

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP CAPAIAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KECAMATAN  
BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Ekonomi (S.E)*

*Program Ekonomi Pembangunan*



Oleh :

**NAMA : RATNA SARI**

**NPM : 1805180005**

**PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Srata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama Lengkap : RATNA SARI  
NPM : 1805180005  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Konsentrasi : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Penguji II

(ERI YANTI NASUTION, S.E.,M.Ec)

**Pembimbing**

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E.,M.Si)

**PANITIA UJIAN**

**Sekretaris**



(H. JANURI, S.E.,M.M.,M.Si)

(Assoc.Prof.Dr. ADE GUNAWAN, S.E.,M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

**Nama Lengkap** : RATNA SARI  
**NPM** : 1805180005  
**Program Studi** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**Konsentrasi** : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP CAPAIAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KECAMATAN  
BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi

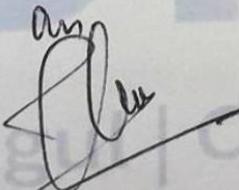


(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : RATNA SARI  
**NPM** : 1805180005  
**PROGRAM STUDI** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**KONSENTRASI** : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia di tuntutan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



RATNA SARI

## **ABSTRAK**

### **Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat**

**RATNA SARI  
1805180005**

**Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**E-mail : [ratnaarly9@gmail.com](mailto:ratnaarly9@gmail.com)**

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat”. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek ekonomi dan sosial di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan dana desa kabupaten Langkat dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebelumnya, capaian sosial dan ekonomi dari Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dalam kategori status desa tertinggal dan tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan APBDes 2022 Pembangunan desa yang dilakukan dari dana desa lebih difokuskan pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa (BLT-DD), bidang penyelenggaraan pembangunan serta bidang penyelenggaraan pemerintahan.

***Kata Kunci : Dana Desa, Indeks Pembangunan Desa (IPD), Indeks Desa Membangun (IDM), Kesejahteraan Masyarakat.***

## ABSTRACT

*Analysis Of Village Fund Management On the Achievement Of Village Community Economic Development, West Brandan District, Langkat Regency*

**RATNA SARI**  
**1805180005**

*Departement of Development Economics, Faculty of Economics and Business,  
Muhammadiyah University of North Sumatera*

*E-mail : [ratnaarly9@gmail.com](mailto:ratnaarly9@gmail.com)*

*In this thesis, the author raises the title "Analysis of Village Fund Management on the Achievement of Economic Development of Village Communities, Brandan Barat District, Langkat Regency". The purpose of this study is to evaluate the management of village funds in village development efforts to improve community welfare both from the economic and social aspects in Brandan Barat District, Langkat Regency. The analytical method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the development of the Langkat district village fund from 2018-2021 has increased from year to year before, the social and economic achievements of the Developing Village Index (IDM) and the Village Development Index (IPD) in the category of underdeveloped village status and community welfare levels. low. The management of village funds in Brandan Barat District, Langkat Regency has been going well and the process of managing village funds is in accordance with the stages that have been set. In accordance with the 2022 APBDes, village development carried out from village funds is more focused on the field of emergency and village urgent disaster management (BLT-DD), the field of development implementation and the field of governance.*

**Kata Kunci :** *Village Fund, Village Development Index (IPD), Village Building Index (IDM), Community Welfare.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, serta kekuatan kepada penulis. Tak lupa Shalawat dan salam Kepada Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat” , yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun demikian penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membimbing penulis, baik moril, material dan ide-ide pemikiran.

Skripsi ini dipersembahkan terkhusus kepada Ayahanda Suparli dan Ibunda Suratmi yang sangat saya sayangi dan saya cintai, yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta dan kasih sayang yang tulus serta ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya. Terwujudnya skripsi ini tak

lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Bapak Dr. H.Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januari, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan seta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
4. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada seluruh Keluarga Sepupu saya (adek Rita, adek Rahma, adek Tira, adek Tia) yang telah memberi support dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman jurusan saya yang telah memberi semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman terbaik saya Erike Dwi Nanda dan Diah Angelina yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan masukan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini
9. Kepada seluruh keluarga besa Ekonomi Pembangunan UMSU dari Angkatan 2018-2021.
10. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu demi satu. Seluruh bantuan yang tidak ternilai harganya ini tidak dapat saya balas satu per satu, semoga Allah SWT membalasnya sebagai amal ibadah dan akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi kita semua, Aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dan berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Medan, September 2022

Penulis

**Ratna Sari**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	31
1.3 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah .....	31
1.3.1 Batasan Masalah .....	31
1.3.2 Rumusan Masalah.....	32
1.4 Tujuan Penelitian.....	32
1.5 Manfaat Penelitian.....	33
1.5.1 Manfaat Akademik .....	33
1.5.2 Manfaat Non-akademik .....	33
<b>BAB II .....</b>	<b>34</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
2.1 Landasan Teoritis .....	34
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi .....	34
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	50
2.1.3 Kebijakan Fiskal .....	64
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah .....	69
2.1.5 Regulasi Pemerintah .....	76
2.1.6 Kebijakan Dana Desa.....	79
2.2 Penelitian Terdahulu.....	84
2.3 Tahapan Penelitian .....	85
2.3.1 Kerangka Analisis Penelitian.....	85
2.3.2 Kerangka Konseptual.....	86
<b>BAB III.....</b>	<b>87</b>

<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>87</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	87
3.2 Definisi Operasional .....	87
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	88
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	88
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	88
3.6 Teknik Analisis Data .....	89
<b>BAB IV .....</b>	<b>90</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>90</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	90
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Langkat.....	90
4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Langkat .....	93
4.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Langkat.....	95
4.1.4 Kondisi Sosial Kabupaten Langkat.....	99
4.2 Analisis Penelitian .....	101
4.2.1 Analisis Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat .....	101
4.2.2 Analisa Ekonomi dan Sosial dari Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat serta 2 desa di Kecamatan Tersebut. ....	103
4.2.3 Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kelantan Dan Desa Perlis di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. ....	107
<b>BAB V.....</b>	<b>117</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>117</b>
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1. 1 Anggaran Dana desa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun9	
Tabel 1. 2 IPM Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara .....	14
Tabel 1. 3 Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Sumatera Utara 2019 ....	21
Tabel 1. 4 Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat 2019 .....	22
Tabel 1. 5Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat 2019 ..	23
Tabel 2. 1Penelitian Terdahulu .....	84
Tabel 3. 1Defini Operasional .....	87
Tabel 3. 2 Jumlah Sampel .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021 .....	3
gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia tahun 2015 – 2020 .....	5
gambar 1. 3 Anggaran Dana Desa.....	6
gambar 1. 4 Anggaran Dana Desa Sumatera Utara.....	8
gambar 1. 5 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2010 - 2021.....	12
gambar 1. 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara, 2011 – 2021	13
gambar 1. 7 Status Desa Dalam Indeks Pembangunan Desa 2014 dan 2020 .....	16
gambar 1. 8 Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau Sumatera, 2018 .....	17
gambar 1. 9 IPD Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa di Indonesia 2018.....	18
gambar 1. 10 IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018..	19
gambar 1. 11 Rata-rata IDM di Indonesia Provinsi 2019 .....	20
gambar 1. 12 Grafik Perbandingan Transfer Ke Daerah Tahun 2005 – 2016 .....	26
gambar 1. 13 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.....	28
gambar 2. 1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	72
gambar 2. 2 Kurva Peacock dan Wiseman .....	73
gambar 2. 3 Kurva Wagner, Solow, Dan Musgrave .....	74
gambar 2. 5 Kerangka Analisis Penelitian .....	86
gambar 2. 6 Bagan Konseptual .....	86
gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Langkat.....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia termasuk ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan Negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk giat membangun baik dari sektor ekonomi, pengadaan infrastruktur maupun pembangunan Sumberdaya Manusia. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan Kesejahteraan Umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan dimaksud agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang baik itu dari bidang ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yaitu tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) suatu Negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pada pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah,

perbaiki sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

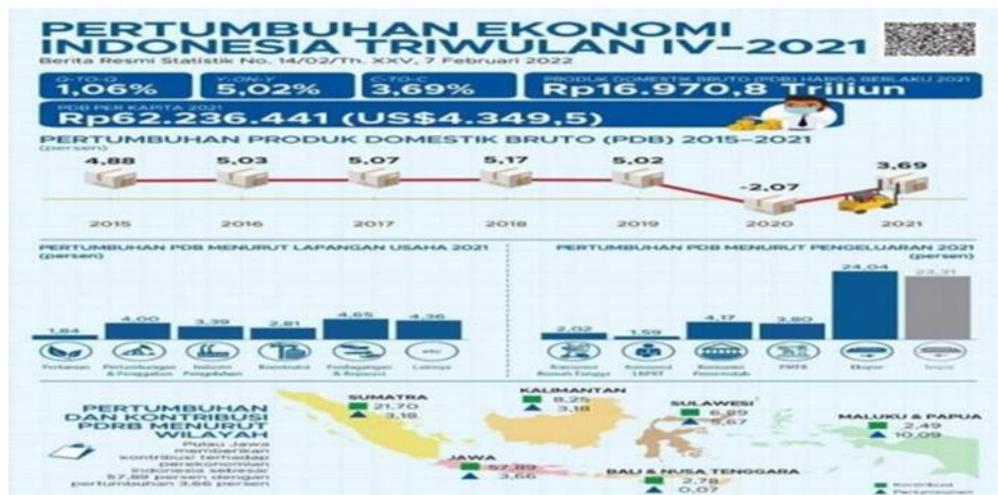
Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana,2000:55). Todaro (dalam Lepi T.Tarmidi,1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sadono Sukino,1985:13).

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran utama. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap daerah. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat

merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Wilayah maju terus meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor non unggulan yang membebani (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018).

Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) yang berlaku dari tahun ke tahun. Berikut ini pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021.



**gambar 1. 1** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021

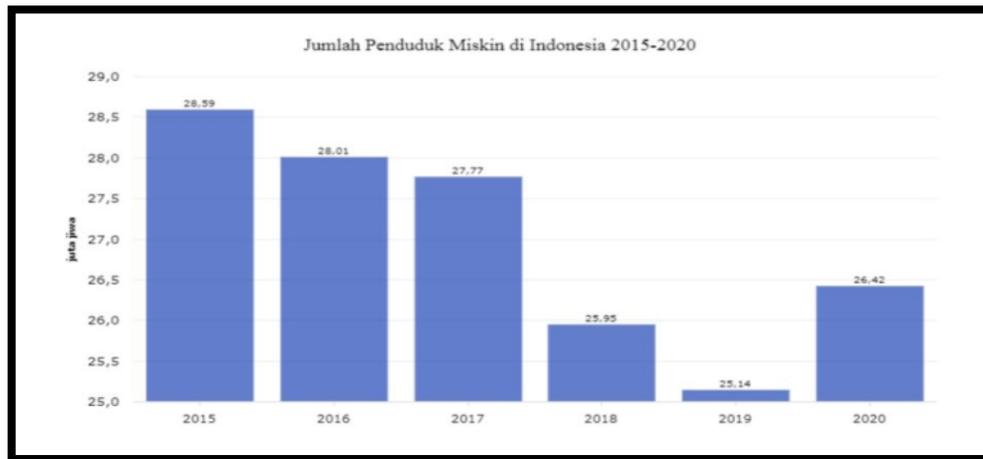
Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) )

Dapat dilihat dari atas, bahwa Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020

mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y on y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. 6 Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q to q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen.

Pertumbuhan yang tinggi belum tentu menjamin bahwa ketidak merataan distribusi pendapatan akan rendah. Karena pertumbuhan ekonomi bisa saja dikatakan pertumbuhan yang semu. Hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia meski pertumbuhan PDB dikatakan bagus. Masalahnya kemiskinan sudah sejak lama menjadi masalah bangsa Indonesia, dan hingga sekarang masalah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Angka statistik terus memberikan informasi yang banyaknya penduduk miskin di Indonesia (Suliswanto,2010).

## Jumlah Penduduk Miskin Indonesia tahun 2015 – 2020



**gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia tahun 2015 – 2020**

*Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) )*

Pada data diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2020, laporan Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09 % dibandingkan pada tahun sebelumnya 25,14 juta. Meningkatnya angka kemiskinan Indonesia dari tahun2019 ke-thun 2020 disebabkan pandemic Covid-19 yang masih melanda Indonesia. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penduduk miskin Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 28,59 juta, lalu pada tahun 2016 menjadi 28,01 juta. Pada tahun 2017 jumlahnya menjadi 27,77 juta dan pada tahun 2018 menjadi 25,95 juta. Masih tingginya angka kemiskinan Indonesia disebabkan Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Pada masa Presiden Republik Indonesia periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya.

Membangun Indonesia dari pinggiran itu berarti desa harus di bangun karena Sebagian besar penduduk Indonesia ada di desa. Masyarakat desa harus di posisikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat desa diberi kewenangan untuk dapat mendefinisikan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa harus menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa. Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan di Desa. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.



**gambar 1. 3 Anggaran Dana Desa**

Sumber : *Kementrian Keuangan RI ( [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) )*

Dapat dilihat dari grafik di atas, tren anggaran dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Alokasi Dana Desa dari APBN pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp 280 juta. Alokasi Dana Desa tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 46,98 triliun naik 1 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk dana desa dengan rata-rata perdesa mendapatkan sebesar Rp 800,4 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya

sebesar Rp 46,98 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 anggaran untuk dana desa tidak mengalami peningkatan dan penurunan, sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 triliun. Pada tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 70 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 933 juta. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 anggaran dana desa meningkat sebesar Rp 72 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 960 juta. Total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2021 mencapai Rp 401,74 triliun.

Dana desa menjadi salah satu kebijakan di pemerintahan Jokowi-JK. Total dana desa tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,75 triliun yang realisasi anggarannya rata-rata hampir mencapai 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 Dana Desa dikeluarkan sebesar 8,5% dari anggaran Transfer ke daerah. Dengan meningkatnya Dana Desa pada setiap tahun, diharapkan kualitas pembangunan desa juga bisa ditinggalkan baik infrastruktur desa maupun sumber daya manusianya.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berada pada posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional yang membawa keuntungan tersendiri dalam menyokong perekonomian daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2016 sebesar Rp 628.394,16 milyar yang tergolong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor pertanian sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai (21,65%). Selanjutnya sektor industri pengolahan (19,98%), sektor perdagangan (17,89%), sektor konstruksi (13,40%) dan sektor-sektor lain memberikan total kontribusi sebesar 27,08% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera

Utara. Pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor tersebut menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. (BPS Provinsi Sumatera Utara)

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara juga dipengaruhi oleh Dana Desa yang ditransfer pemerintah pusat ke-daerah. Sumatera Utara termasuk provinsi dengan anggaran dana desa terbesar diantara provinsi lainnya. Berikut jumlah anggaran dana desa di Provinsi Sumatera Utara.

### Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatera Utara 2015 – 2020 (Triliun)

#### Dana Desa Provinsi Sumut 2015 – 2020 (Triliun)



**gambar 1. 4 Anggaran Dana Desa Sumatera Utara**

Sumber : Kementerian Keuangan RI ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Pada tahun 2015 anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,46 triliun. Pada tahun 2016 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 3,29 triliun naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 4,19 triliun untuk dana desa. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 anggaran untuk dana desa mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya yaitu sebesar Rp 3,87 triliun. Tahun 2019 dana desa mengalami peningkatam sebesar Rp 4,45 triliun. Kemudian pada tahun 2020 anggaran dana desa meningkat kembali sebesar Rp 4,50 triliun.

Setelah jumlah besarnya Anggaran Dana Desa pada setiap Provinsi Sumatera Utara terdapat juga Anggaran Dana Desa setiap kabupaten atau Kota provinsi Sumatera Utara. Berikut ini perkembangan anggaran dana desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 1. 1 Anggaran Dana desa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2021**

Wilayah	Jumlah Desa	Anggaran Dana Desa (Milyar)			
		2018	2019	2020	2021
Kab. Asahan	204	126.570.894.000	146.090.415.000	150.506.325.000	152.083.710.000
Kab. Dairi	169	111.910.524.000	127.172.564.000	130.304.470.000	129.738.730.000
Kab. Deli Serdang	394	271.906.373.000	306.386.948.000	312.277.329.000	312.546.966.000
Kab. Karo	269	173.021.882.000	197.078.926.000	201.208.286.000	198.409.273.000
Kab. LabuhanBatu	98	60.371.923.000	70.226.102.000	72.182.696.000	74.477.417.000
Kab. Labuhanbatu Selatan	73	46.205.735.000	61.548.371.000	65.076.224.000	67.788.110.000
Kab. Labuhanbatu Utara	90	68.036.521.000	79.123.527.000	83.576.158.000	86.022.841.000
<b>Kab. Langkat</b>	<b>277</b>	<b>178.799.190.000</b>	<b>205.446.268.000</b>	<b>211.213.256.000</b>	<b>213.259.749.000</b>
Kab. Mandailing Natal	407	252.910.057.000	285.841.420.000	290.920.103.000	286.845.864.000
Kab. Nias	170	148.261.931.000	180.585.127.000	181.381.215.000	179.544.025.000
Kab. Nias Utara	113	110.728.446.000	137.008.319.000	137.596.573.000	136.386.189.000
<b>Kab. Nias Selatan</b>	<b>461</b>	<b>314.481.751.000</b>	<b>348.422.333.000</b>	<b>356.099.164.000</b>	<b>351.138.751.000</b>
Kab. Nias Barat	105	92.269.401.000	114.000.248.000	118.531.988.000	117.397.253.000
Kab. Simalungun	413	259.232.136.000	294.442.204.000	298.689.733.000	296.800.840.000
Kab. Tapanuli Selatan	248	145.856.856.000	167.751.279.000	172.034.790.000	169.754.513.000
Kab. Tapanuli Tengah	215	121.058.197.000	140.541.973.000	144.349.335.000	142.631.022.000

Kab. Tapanuli Utara	252	164.129.846.000	184.186.164.000	194.621.304.000	192.016.817.000
Kab. Toba Samosir	244	154.311.189.000	176.101.238.000	179.571.269.000	177.074.852.000
Kab. Pakpak Bharat	52	40.948.983.000	48.298.630.000	50.424.120.000	50.970.983.000
Kab. Humbang Hasundutan	154	105.690.046.000	123.336.297.000	126.028.454.000	124.934.505.000
Kab. Serdang Bedagai	243	162.911.520.000	184.774.302.000	187.834.594.000	185.739.448.000
Kab. Samosir	134	90.921.937.000	108.744.499.000	109.313.044.000	107.929.748.000
Kab. Batu Bara	151	104.583.228.000	118.843.171.000	121.634.028.000	121.071.737.000
Kab. Padang Lawas	304	204.748.115.000	230.097.858.000	233.549.721.000	230.275.200.000
Kab. Padang Lawas Utara	388	254.318.741.000	287.244.660.000	293.516.929.000	289.345.427.000
Kota Gunungsitoli	101	77.009.849.000	89.077.769.000	90.367.394.000	89.308.308.000
Kota Padang Sidimpuan	79	33.662.556.000	39.678.754.000	41.395.568.000	41.800.048.000
<b>Total</b>	<b>5.808</b>	<b>3.874.857.827.000</b>	<b>4.452.049.366.000</b>	<b>4.554.128.070.000</b>	<b>4.525.292.326.000</b>

Sumber : Kementerian Keuangan RI ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Pada tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran Dana Desa setiap Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai 2021. Rata-rata disetiap kabupaten mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, ini disebabkan oleh tujuan dari pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia dari pinggiran yang bertujuan untuk kesejahteraan. Anggaran Dana Desa terbesar pada Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp 351.138.751.000 dengan jumlah desa sebanyak 461 desa. Sedangkan anggaran yang terendah yaitu kota Padang Sidimpuan sebesar Rp 41.800.048.000 dengan jumlah desa sebanyak 79 desa. Total dari Anggaran Dana Desa 27 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2021 yaitu sebesar Rp 4,526 triliun. Disamping itu Kabupaten Langkat dapat dikatakan Kabupaten dengan anggaran dana desa yang sedang

melihat jumlah desanya sebanyak 277 desa dengan anggaran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan serta sangat berpengaruh terhadap perkembangan desa tersebut baik dari segi ekonomi, pendidikan, kemandirian masyarakat dan lain sebagainya.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"– 4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km<sup>2</sup> (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Kabupaten Langkat memiliki 23 Kecamatan dimana kecamatan luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km<sup>2</sup> atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km<sup>2</sup> atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 km<sup>2</sup> atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat. Sejak dimulainya program Dana Desa pemerintah dan masyarakat mengutarakan begitu banyak harapan yang di antaranya adalah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur dan sektor padat karya yang bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur bagaimana otonomi daerah dengan mekanisme transfer ke daerah dan dana desa dikelola baik untuk kesejahteraan masyarakat dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (Human Development Report). IPM adalah

pengukuran perbandingan dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak untuk semua Negara/wilayah di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun untuk mengklasifikasikan apakah suatu Negara atau wilayah adalah negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

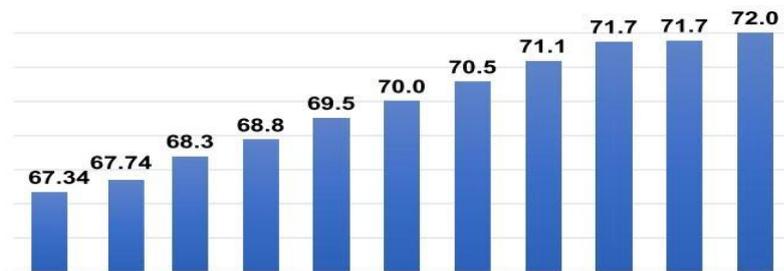


**gambar 1. 5** Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2010 - 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 1,30 persen. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020

yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.



**gambar 1. 6Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara, 2011 – 2021**

Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dapat dilihat gambar diatas menunjukkan bahwa IPM Sumatera Utara pada tahun 2021 mencapai 72,00 peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2021 mengalami peningkatan tahun sebelumnya, IPM Sumatera Utara 2021 adalah sebesar 72,00 atau tumbuh 0,32 persen (meningkat 0,23 poin) dibandingkan capaian IPM 2020.

**Tabel 1. 2 IPM Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara**

Kabupaten Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Langkat	64.5 7	65.7 7	66.1 8	67.17	68.00	68.5 3	69.1 3	69.8 2	70.2 7	70.76	71.00
Sumatera utara	67.0 9	67.3 4	67.7 4	68.36	68.87	69.5 1	70.0 0	70.5 7	71.1 8	71.74	71.77

Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas perkembangan IPM Langkat dalam 2 tahun terakhir 2018-2020, menunjukkan peningkatan dan berada pada status menengah atas. Akan tetapi masih dibawah IPM Sumatera Utara. Jika dibandingkan perkembangan IPM Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, IPM Langkat meningkat akan tetapi peningkatannya tidak mengalami peningkatan tetap diperingkat 15.

Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Langkat IPM Langkat untuk tahun 2018 70,27 dan tahun 2020 71,00. Pemerintah berharap kedepan akan terjadi peningkatan IPM warga Langkat, untuk itu kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi supaya terus semakin meningkat. walaupun pertumbuhan ekonomi Langkat masih tetap didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perikanan, kehutanan.

Salah satu factor yang menentukan pembangunan nasional adalah indeks kualitas hidup. Indeks Kualits Hidup (IKH) atau *Physical Quality Of Life Index* (*PQLI*) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks makro ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi.

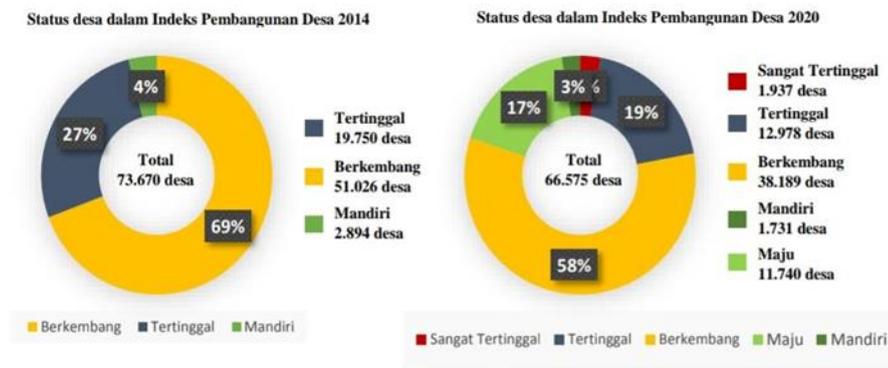
Pembangunan di desa selalu bertumpu pada dua hal yakni upaya peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Sehingga, Dana Desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia. Dalam Permendes ini, prioritas penggunaan Dana Desa akan mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. (Gus Mentri)

Setiap desa menerima dana yang besar dari Pemerintah Daerah (APBD) maupun Pemerintah Pusat (APBN). Dana Desa yang diberikan menjadi tiga bagian, yakni Dana Desa yang bersumber dari APBD. Terkhusus dari Dana Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota (Riyadi,2000). Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Jamluddin,et.all.2018). besarnya anggaran yang dikelola oleh des aini, membuat pemerintah pusat perlu membuat pengukuran. Sehingga dikeluarkan Permendes PDTTTrans No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Dalam menggambarkan hasil pembangunan dari pinggiran terdapat beberapa indeks yang dapat digunakan diantaranya Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Hingga saat ini, pengukuran pembangunan desa dengan IPD dilaksanakan dua kali, dalam rangka perencanaan dan evaluasi. Untuk memenuhi target pembangunan desa, pemerintah memetakan pembangunan desa berdasarkan tingkat

pembangunannya, berikut perbandingan Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 dan 2020.



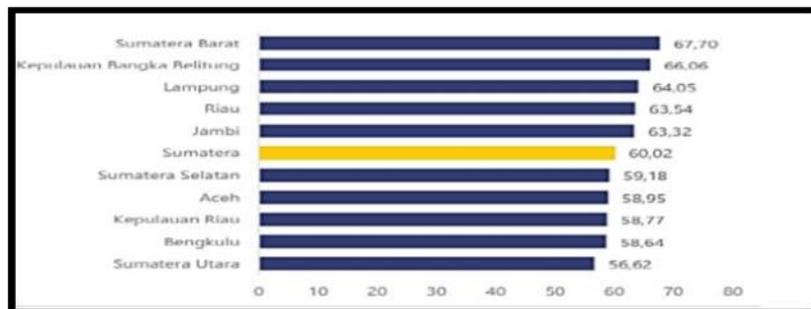
**gambar 1. 7**Status Desa Dalam Indeks Pembangunan Desa 2014 dan 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) )

Berdasarkan data diatas hasil publikasi IPD tahun 2014, desa mandiri berjumlah 2.894 desa. Desa berkembang berjumlah 51.026 desa dan desa tertinggal berjumlah 19.750 desa. Pada tahun 2020 desa mandiri berjumlah 1.731 desa, desa maju berjumlah 11.740 desa, desa berkembang berjumlah 38.189 desa dan desa tertinggal berjumlah 12.978 desa, kemudian desa sangat tertinggal berjumlah 1.930 desa. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Namun untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dari tahun 2014 dan 2020, dilakukan penyamaan desa antara 2014 dan 2020. Hal ini bertujuan, supaya pembangunan yang wilayah yang dilaksanakan anantara tahun 2014 dan 2020 merujuk pada suatu wilayah yang sama. Dengan demikian, perlu direduksi dengan menyatukan kembali desa yang mengalami pemekaran dan menyesuaikan kembali desa yang mengalami penggabungan sejak 2014 hingga 2020. Sehingga wilayah desa dapat dilihat perkembangannya secara panel 2014 sebesar 73.670 desa dan 2020 sebesar 66.575 desa. Perkembangan pembangunan desa yang secara panel

ini dilakukan untuk mengetahui realistis pembangunan desa yang sesungguhnya dengan memperkiarakan seberapa besa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa serta skala kriteria yang bertambah yaitu desa sangat tertinggal dan desa maju.

Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional (59,36). Ketiga pulau tersebut adalah pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.



**gambar 1. 8Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau Sumatera, 2018**

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2018([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id) )*

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui kondisi perkembangan desa di Pulau Sumatera memiliki nilai IPD tertinggi adalah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai indeks 67,70, di ikuti oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 66,06 serta Provinsi Lampung dengan nilai 64,05. Sedangkan nilai Indeks Pembangunan Desa terendah beradadi Provinsi Sumatera Utara dengan nilai indeks 56,62. Sedangkan pada nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa pula

sumatera yaitu sebesar 60,02 berada diatas rata-rata nasional atau terbesar ketiga setelah pulau Jawa-Bali dan Pulau Sulawesi.

Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD					Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sumatera	60,02	59,09	46,15	77,72	54,01	67,85	4,11	25,23	1,48	23 241
Jawa-Bali	67,82	68,31	54,78	81,15	59,14	80,34	0,26	25,28	5,09	23 108
Nusa Tenggara	56,25	53,86	34,41	82,55	45,78	75,25	1,46	3,77	0,13	4 043
Kalimantan	56,66	55,41	40,90	71,01	55,35	71,36	2,24	6,26	0,28	6 624
Sulawesi	60,63	57,81	44,77	83,04	51,81	72,78	1,46	9,83	0,38	8 804
Maluku	52,00	49,08	34,68	73,39	46,30	66,55	1,28	1,66	0,07	2 268
Papua	35,57	26,15	19,76	57,86	42,02	52,24	8,36	1,37	0,02	7 348
Indonesia	59,36	57,65	44,63	77,00	53,60	71,40	19,17	73,40	7,43	75 436

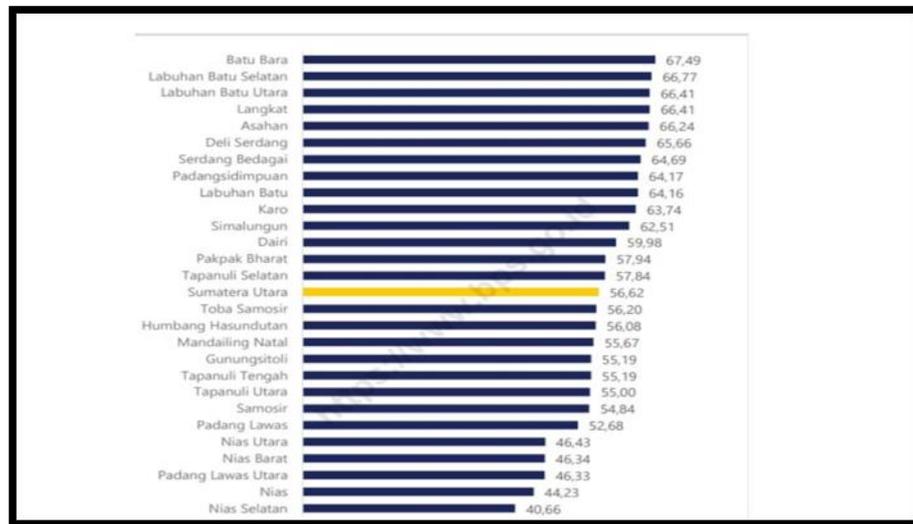
**gambar 1. 9 IPD Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa di Indonesia 2018**

Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Saat ini desa-desa di Pulau Sumatra didominasi oleh desa-desa berkembang yaitu sekitar 81,88 persen dari total 23.241 unit desa. Sementara persentase desa mandiri sebanyak 4,79 persen (1.114 desa) dan desa tertinggal 13,33 persen (3.097 desa). Dilihat dari dimensinya/transportasi memiliki nilai indeks yang paling besar yaitu 77,72 sedangkan dimensi kondisi infrastruktur memiliki nilai indeks paling kecil yaitu hanya 46,15.

Kondisi Perkembangan Desa Indonesia di Provinsi Sumatra Utara memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Desa sebesar 56,62437 desa,. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 59,36. Dari 5.437 desa, terdapat 3.768 desa dalam kategori berkembang (69,30 persen), sebanyak 200 desa mandiri (3,68 persen) dan sisanya sebanyak 1.469 desa (27,02 persen) dalam kategori tertinggal. Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Sumatra Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada dimensi

kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 41,71. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,94, dimensi pelayanan umum sebesar 49,76, dan dimensi penyelenggaraan pemerintah sebesar 62,43.



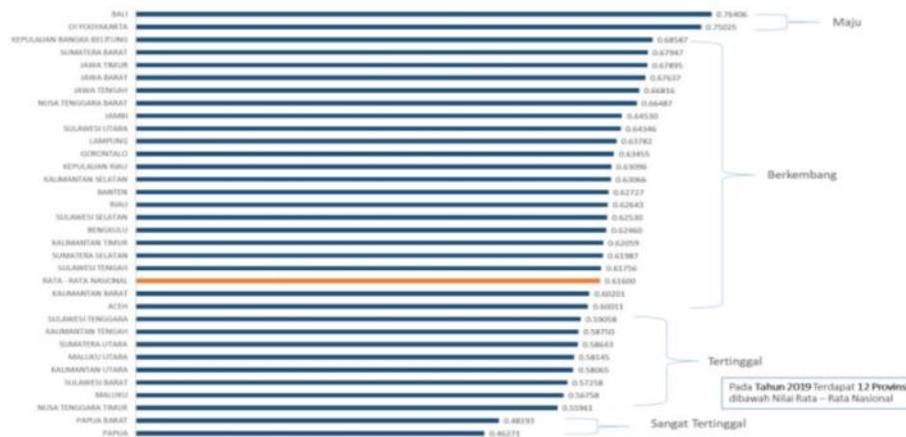
**gambar 1. 10 IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018**

Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatra Utara terdapat di Kabupaten Batu Bara dengan angka 67,49. Sedangkan kabupaten Langkat berada di posisi ke 4 (Empat) dengan angka 66,41 sama seperti Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan untuk rata-rata nilai indeks terendah di Provinsi Sumatra Utara terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata IPD sebesar 40,66.

Perkembangan IDM menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan IPD. Dimana desa sangat tertinggal dan tertinggal berkurang secara signifikan dan jumlah desa berkembang dan maju bertambah secara signifikan pula di tahun 2019. Pengurangan desa sangat tertinggal mencapai 6.616 desa, sedangkan desa tertinggal berkurang 12.991 desa. Sementara itu penambahan desa berkembang

sebesar 15.723 desa dan desa maju bertambah 4.929 desa. Desa mandiri juga bertambah dari 174 desa menjadi 823 desa.



**gambar 1. 11 Rata-rata IDM di Indonesia Provinsi 2019**

Sumber: BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa nilai IDM terbesar terdapat di Provinsi Bali dengan nilai 0,76406 yang memasuki kategori maju. Sedangkan nilai rata-rata nasional memiliki nilai sebesar 12 provinsi yang memiliki IDM dibawah nilai rata-rata atau tertinggal salah satunya termasuk provinsi Sumatera Utara dengan nilai indeks 0,58643.

Dengan begitu kita dapat melihat persentasi di Provinsi Sumatra Utara yang mempunyai kategori mulai dari Kabupaten yang maju sampai Kabupaten tertinggal. Berikut tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 3 Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Sumatera Utara 2019**

Provinsi / kabupaten	Average of IKS20 19	Average of IKE 209	Average of IKL 2019	Average of Nilai IDM	Jumlah Desa	Status Kabupaten
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>0.6581</b>	<b>0.4639</b>	<b>0.6373</b>	<b>0.5864</b>	<b>5,417</b>	<b>TERTINGGAL</b>
KOTA PADANGSIDIMPUAN	0.7480	0.5738	0.6429	0.6549	42	BERKEMBANG
LABUHAN BATU SELATAN	0.7897	0.5609	0.6051	0.6519	52	BERKEMBANG
DELI SERDANG	0.7425	0.5440	0.6535	0.6467	380	BERKEMBANG
<b>LANGKAT</b>	<b>0.7546</b>	<b>0.5215</b>	<b>0.6531</b>	<b>0.6430</b>	<b>240</b>	<b>BERKEMBANG</b>
ASAHAN	0.7401	0.5250	0.6512	0.6388	177	BERKEMBANG
KARO	0.7042	0.5382	0.6674	0.6366	259	BERKEMBANG
SERDANG BEDAGAI	0.7399	0.5175	0.6523	0.6366	237	BERKEMBANG
BATU BARA	0.7450	0.4991	0.6653	0.6364	141	BERKEMBANG
PAKPAK BHARAT	0.7304	0.5010	0.6757	0.6357	52	BERKEMBANG
SIMALUNGUN	0.7116	0.5347	0.6561	0.6342	386	BERKEMBANG
LABUHAN BATU	0.7720	0.5096	0.6196	0.6337	75	BERKEMBANG
LABUHAN BATU UTARA	0.7443	0.4876	0.6016	0.6112	82	BERKEMBANG
SAMOSIR	0.6899	0.4870	0.6417	0.6062	128	BERKEMBANG
HUMBANG HASUNDUTAN	0.6635	0.4832	0.6580	0.6016	153	BERKEMBANG
TAPANULI SELATAN	0.6761	0.4933	0.6123	0.5939	211	TERTINGGAL
TOBA SAMOSIR	0.6588	0.4841	0.6251	0.5893	231	TERTINGGAL
DAIRI	0.6328	0.4870	0.6257	0.5818	161	TERTINGGAL
PADANG LAWAS	0.6122	0.4603	0.6506	0.5744	303	TERTINGGAL
KOTA GUNUNGSITOLI	0.6107	0.4298	0.6783	0.5729	98	TERTINGGAL
TAPANULI TENGAH	0.6175	0.4463	0.6302	0.5647	159	TERTINGGAL
TAPANULI UTARA	0.6355	0.4453	0.6072	0.5627	241	TERTINGGAL
MANDAILING NATAL	0.6159	0.4539	0.6122	0.5607	377	TERTINGGAL
PADANG LAWAS UTARA	0.5851	0.4008	0.6358	0.5406	386	TERTINGGAL
NIAS	0.5756	0.3287	0.6298	0.5114	170	TERTINGGAL
NIAS UTARA	0.5637	0.3281	0.6333	0.5084	112	TERTINGGAL
NIAS SELATAN	0.5321	0.3249	0.6311	0.4960	459	TERTINGGAL
NIAS BARAT	0.5439	0.3217	0.5416	0.4691	105	SANGAT TERTINGGAL

Sumber :BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dapat dilihat pada tabel 1.2 Pada tahun 2019 IDM Provinsi Utara memiliki 14 kategori Kabupaten berkembang, 12 kategori tertinggal dan 1 Kabupaten yang sangat tertinggal. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh Kabupaten Kota

Padangsidempuan dengan nilai 0.6549 yang termasuk kategori berkembang. Sedangkan Kabupaten Langkat berada di peringkat ke 4 (empat) dengan memiliki nilai 0.6430 yang juga termasuk kategori berkembang. Dan IDM yang berada di urutan terakhir yaitu Kabupaten Nias Barat dengan nilai 0.4691 yang termasuk kategori sangat tertinggal.

Dengan begitu kita dapat melihat persentasi di Kabupaten Langkat yang mempunyai kategori mulai dari Kecamatan yang maju sampai tertinggal. Berikut tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 4 Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat 2019**

Kabupaten/kecamatan	Average of IKS 2019	Average of IKE 209	Average of IKL 2019	Average of Nilai IDM	Jumlah Desa	Status Kecamatan
LANGKAT	0.7546	0.5215	0.6531	0.6430	240	BERKEMBANG
BAHOROK	0.784	0.4648	0.8667	0.7053	18	BERKEMBANG
SAWIT SEBERANG	0.8581	0.5306	0.6556	0.6814	6	BERKEMBANG
BABALAN	0.8315	0.6250	0.5667	0.6744	4	BERKEMBANG
PANGKALAN SUSU	0.7587	0.5815	0.6519	0.6640	9	BERKEMBANG
STABAT	0.8667	0.5806	0.5445	0.6639	6	BERKEMBANG
SECANGGANG	0.7664	0.6062	0.6125	0.6617	16	BERKEMBANG
SEI BEI	0.7429	0.5756	0.6667	0.6617	15	BERKEMBANG
BINJAI	0.7562	0.5028	0.7222	0.6604	6	BERKEMBANG
SIRAPIT	0.7623	0.5433	0.6733	0.6597	10	BERKEMBANG
WAMPU	0.7943	0.5154	0.6359	0.6485	13	BERKEMBANG
SEI LEPAN	0.8000	0.4593	0.6815	0.6469	9	BERKEMBANG
SALAPIAN	0.7297	0.5625	0.6375	0.6432	16	BERKEMBANG
HINAI	0.7600	0.5458	0.6222	0.6427	12	BERKEMBANG
GEBANG	0.7206	0.5000	0.7067	0.6424	10	BERKEMBANG
SELESAI	0.7112	0.5397	0.6667	0.6392	13	BERKEMBANG
TANJUNG PURA	0.7302	0.4935	0.6148	0.6128	18	BERKEMBANG
BESITANG	0.7657	0.5306	0.6111	0.6358	6	BERKEMBANG
PADANG TUALANG	0.7865	0.5303	0.5576	0.6248	11	BERKEMBANG
KUALA	0.7253	0.5012	0.6095	0.6120	14	BERKEMBANG
KUTAMBARU	0.7057	0.4542	0.6334	0.5977	8	TERTINGGAL
BERANDAN BARAT	0.7143	0.4467	0.6134	0.5914	5	TERTINGGAL

PEMATANG JAYA	0.6764	0.4167	0.6667	0.5866	8	TERTINGGAL
BATANG SERANGAN	0.7094	0.4405	0.6095	0.5865	7	TERTINGGAL

Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Pada tabel 1.3 pada tahun 2019 IDM Kabupaten Langkat memiliki 19 kategori Kecamatan yang berkembang dan 4 kategori yang tertinggl. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh Kecamatan Bahorok dengan nilai 0.7053 yang termasuk kategori berkembang. Dan Kecamatan yang memilki nilai IDM terendah yaitu Kecamatan Batang Serangan dengan Nilai IDM 0.5865 yang termasuk dalam kategori tertinggal sedangkan Kecamatan Brandan Barat berada diurutan 3 (tiga) kebawah dengan nilai IDM 0.5914 dengan kategori tertinggal.

Dengan begitu kita dapat melihat persentasi di Kecamatan Brandan barat yang mempunyai kategori mulai dari Desa yang maju sampai Desa tertinggal. Berikut tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 5Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat 2019**

Kecamatan/Desa	Average of Nilai IDM	Status Kecamatan
BERANDAN BARAT	0.5914	TERTINGGAL
LUBUK KASIH	0.6316	BERKEMBANG
PERLIS	0.5852	TERTINGGAL
KELANTAN	0.5584	TERTINGGAL
LUBUK KERTANG	0.5412	TERTINGGAL
SEI TUALANG	0.5284	TERTINGGAL

Sumber :BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dapat kita lihat pada tabel 1.4 pada tahun 2019 IDM Kecamatan Brandan Barat memiliki 1 kategori Desa yang berkembang dan 4 kategori yang tertinggl. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh Desa Lubuk Kasih dengan nilai 0.6316 yang termasuk kategori berkembang. Dan Desa yang memilki nilai IDM terendah yaitu Desa Sei Tualang dengan Nilai IDM 0.5284 yang termasuk dalam kategori

tertinggal. Begitu juga Desa Perlis, Kelantan, Lubuk Kertang merupakan kategori desa tertinggal.

Pada masa Presiden Republik Indonesia periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Membangun Indonesia dari pinggiran itu berarti desa harus dibangun karena sebagian besar penduduk Indonesia ada di desa. Masyarakat desa harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat desa diberi kewenangan untuk dapat mendefinisikan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa harus menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa. Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan di Desa. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan public, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasi (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

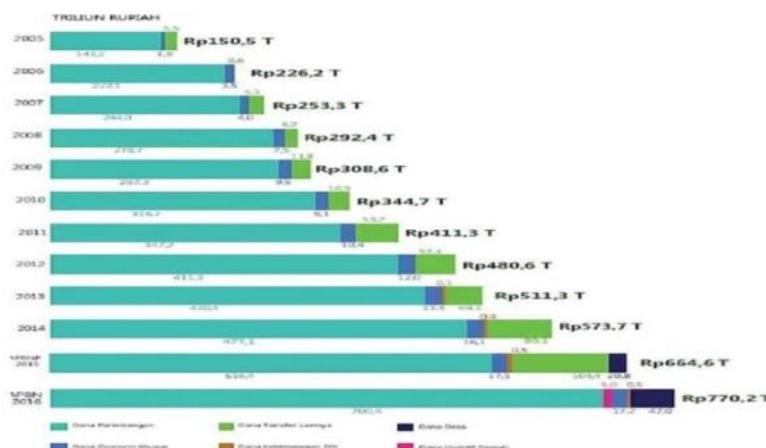
UU NO.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana bagi Hasil berperan sebagai penyeimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Detailnya, diluar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pada tahun 2017, pemerintah pusat telah menganggarkan transfer ke daerah dan termasuk juga Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Transfer ke daerah mencapai Rp. 755,9 triliun meningkat dengan selisih Rp. 10,3 triliun pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar Rp. 7662,2 triliun. Sedangkan untuk dana desa juga ikut meningkat yang awalnya hanya Rp. 5,8 triliun menjadi Rp. 60 triliun. Harapaannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat

mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.

Beda pemerintahan berbeda pula focus penggunaan atau alokasi anggaran. Perbedaan itu muncul dikarenakan adanya faktor eksternal maupun perbedaan kebijakan masing-masing pemerintahan. Perbedaan focus alokasi anggaran ini setidaknya terlihat dari proporsi penggunaan anggaran antara pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang sudah berlangsung hampir lima tahun (2014-2019) dengan pemerintahan sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono (2009-2014).

Pada awal pemerintahannya, Jokowi- JK sudah memangkas subsidi bahan bakar minyak. Pemerintahan ini memilih merealokasikan anggaran subsidi untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam agenda kerjanya, selain bidang pendidikan dan kesehatan. Karena itu, alokasi anggaran infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Terutama pada masa pemerintahan Jokowi-JK pembangunan berfokus pada daerah pinggiran yaitu pedesaan.



**gambar 1. 12** Grafik Perbandingan Transfer Ke Daerah Tahun 2005 – 2016

*Sumber : Kementerian Keuangan RI ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))*

pada grafik diatas, perkembangan dana transfer ke daerah meningkat jauh lebih pesat pada masa pemerintahan Jokowi – JK. Pada Era SBY rata-rata alokasi transfer daerah sebesar 32 % dari total belanja Negara. Di era Jokowi, rata-rata alokasi transfer daerah mampu ditingkatkan mencapai 36 % dari total belanja Negara. Transfer daerah juga difokuskan melalui Dana Otonomi Khusus atau Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pembangunan infrastruktur fisik yang dapat menambah daya saing daerah. Komitmen untuk mendukung pembangunan dari pinggiran juga ditunaikan melalui implementasi Dana Desa pada 2015. Anggaran Dana Desa terus bertambah dari Rp 20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 47,0 triliun pada tahun 2016. Tujuan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Salah satu komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan peningkatan jumlah alokasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) dalam jangka menengah. Sejalan dengan amanat UU Desa, jumlah alokasi TKD kemudian juga ditambah dengan komponen Dana Desa (DD) sejak tahun 2018. Bahkan jika dilihat dalam postur APBN 2021, alokasi belanja TKDD lebih besar dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pusat.



**gambar 1. 13 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa**

*Sumber :Indonesia Baik ([www.indonesiabaik.id](http://www.indonesiabaik.id) )*

Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp796,3 triliun pada rancangan APBN 2021. Dana tersebut akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi di desa serta mendukung pengembangan sektor prioritas. Dengan anggaran Rp 796,3 triliun ini, terjadi penurunan alokasi pada tahun sebelumnya. Sedangkan, transfer ke daerah terus meningkat. Dari Rp 766,2 triliun pada tahun 2018, Rp 826,77 triliun pada tahun 2019, hingga Rp 856,94 triliun pada tahun 2020.

Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan

kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut (Kemendes PDDT,2016).

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD belum sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Kabupaten Langkat adalah salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.273,29 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sejumlah 1.030.202 jiwa (2020). Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Langkat antara tahun 2020 - 2021 adalah 0,61 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 1.034.519 jiwa. Sementara itu, kepadatan penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2020 mencapai 165 jiwa per kilometer persegi. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2020 mencapai 68,80 dan naik di tahun 2021

menjadi 68,97. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Langkat di tahun 2021 mencapai angka 71,35 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 71,00.

Pada penelitian ini saya meneliti salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat yaitu Kecamatan Brandan Barat. Terdiri dari 5 desa yaitu : Kelantan, Perlis, Sei Tualang, Lubuk Kasih, dan Lubuk Kertang. Kecamatan Brandan Barat memiliki Luas Wilayah 89,80 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk Sebanyak 23,294 jiwa/km<sup>2</sup> dengan nilai rasio jenis kelamin sebesar 105,49, kecamatan Brandan Barat merupakan daerah dengan rasio jenis kelamin tertinggi yang memiliki makna bahwa disetiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. . Pada pengelolaan jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke Kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar Rp 213.259.749.000. jumlah tersebut dibagi rata dengan jumlah desa yang ada desa yang ada di Kabupaten Langkat sebanyak 240 desa. Salah satu Kecamatan yang menerima dana desa adalah Kecamatan Brandan Barat .

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penelilit tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan alokasi dana desa untuk kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan melihat fenomena yang terjadi di desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah mengenai analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa kec. Brandan Barat kab. Langkat :

1. Pelaksanaan anggaran Dana Desa yang sangat besar tersebut masih mempunyai kendala. Salah satunya masih rendahnya aparatur pemerintah Daerah dan Desa untuk mengelola penggunaan Dana Desa rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat
2. Adanya perbedaan karakteristik luas wilayah, jumlah penduduk dan keadaan perekonomian di setiap desa mengindikasikan kurang efektifnya penyaluran Dana Desa.
3. Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki nilai rata-rata nasional sebesar 0,616000 yang memasuki kategori berkembang sedangkan provinsi Sumatera Utara memiliki nilai indeks 0,58643 dengan kategori tertinggal.
4. Kabupaten Langkat termasuk dalam golongan kategori berkembang dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) 0.6430 yang terdiri dari 19 kecamatan yang berkembang dan 4 kategori tertinggal
5. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih sangat rendah. Disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah

## **1.3 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.3.1 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah diatas, maka peneliti hanya fokus membatasi masalah pada seberapa besar tata kelola kebijakan Dana Desa mampu mempengaruhi pengembangan ekonomi pedesaan dalam mencapai

pembangunan ekonomi masyarakat desa di wilayah Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat

### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan di kecamatan Brandan Barat kabupaten Langkat sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Dana Desa di Kabupaten Langkat dan kecamatan Brandan Barat ?
2. Bagaimana capaian dari Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM ) yang telah didapat oleh Kabupaten Langkat dan Desa di Kecamatan Brandan Barat ?
3. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa pada 2 Desa di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Kec. Brandan Barat Kab. Langkat adalah :

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan Dana Desa di Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat.
2. Melakukan analisa ekonomi dan sosial dari capaian IPD dan IDM untuk Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat serta 2 desa di Kecamatan tersebut.

3. Melakukan evaluasi tentang pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kelantan dan desa Perlis di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini dapat bermanfaat, yakni :

### **1.5.1 Manfaat Akademik**

- a. Membantu perkembangan ilmu ekonomi terkhususnya ekonomi politik dan ekonomi pembangunan tentang kebijakan dan desa yang bersumber dari APBN
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelti baru yang dapat mendukung dalam mengetahui evaluasi kebijakan dana desa.
- c. Memberikan pengetahuan dalam mengelola anggaran pemerintah khususnya dana desa.

### **1.5.2 Manfaat Non-akademik**

- a. Bagi pemerintah daerah desa kec. Brandan Barat Kab. Langkat dapat dijadikana acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan kebijakan daerah khususnya alokasi Dana Desa
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- c. Dapat menjadikan suatu pemahaman bagi para pembaca agar memberikan suatu ilmu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi**

Secara umum Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak (Todaro, 2000). Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa keseluruhan dalam Todaro dan Smith,(2006).

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru, dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan

jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan Negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas perekonomian stabilitas perekonomian Negara (Jhingan, 2014).

Pembangunan memiliki konsep melalui proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan keuangan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu dalam Todaro. Oleh karena itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan juga untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro & Smith, 2011)

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2011).

Todaro dalam (Arsyad 1999;5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi: pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*). Kedua, meningkatnya rasa harga diri (*selfesteem*) masyarakat sebagai manusia; dan ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses, sosial, ekonomi, dan lembaga yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tujuan (Todaro & Smith, 2011).

Salah satu dampak negatif dari perubahan structural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, dimana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang di tinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika hal ini dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011).

## **A. Teori Pembangunan Ekonomi Aliran Klasik**

### **1. Adam Smith**

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini :

#### **a. Hukum alam**

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional.

#### **b. Pembagian Kerja**

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan : pertama, meningkatnya keterampilan pekerja. Kedua, penghematan waktu dalam memproduksi barang. Ketiga,

penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar – menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

### c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan. “Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penghasilan yang besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

## **2. Teori Schumpeter**

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*dicontinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan,2010). Pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal (Jhingan,2010).

Maka pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang mengansumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna,. Keseimbangan itu ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut "aru" sirkuler) yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dalam lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan.(Jhingan,2010).

Schumpeter menggambarkan proses pembangunan kapitalis ini sebagai suatu destruktif kreatif, yang membuat struktur ekonomi masyarakat lama terus-menerus diruntuhkan dan struktur bar uterus dibangun di atasnya. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci utama di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputus-putus. Gerakan siklis merupakan baiaya pembangunan ekonomi dibawah kapitalisme, suatu ciri tetap perjalanannya yang dinamis. Penerapan teori

Schumpeter pada Negara terbelakang begitu terbatas seperti perbedaan tatanan sosio-ekonomi, kurangnya kewirausahaan, tidak dapat diterapkan pada Negara sosialis, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi, mengabaikan konsumsi, tabungan, pengaruh eksternal, pertumbuhan dan penduduk. Walaupun demikian, teori Schumpeter menggaris bawahi pentingnya pembiayaan inflsioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi (Jingan,2010).

### **3.Teori David Ricardo**

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jhingan dan Todaro).

Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1917). melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “ pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi (Jhingan, 2010) . Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri.
2. Berlakunya hukum : “ law of deminishing return “ bagi tanah
3. Persediaan tanah adalah tetap
4. Permintaan gandum benar – benar inelastik
5. Buruh dan Modal adalah masukan yang bersifat variabel
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
10. Terdapat persaingan sempurna
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Teori David Richardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bilamana faktor – faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

### **B. Teori Pembangunan Arthur Lewis**

Teori pembangunan Arthur Lewis pada umumnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan

proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengansumsikan bahwa perekonomian suatu Negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu :

### **1. Perekonomian Tradisional**

Teori Lewis mengansumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah rill ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

### **2. Perekonomian Industri**

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai

pasif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang akan meningkatkan output yang di produksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengansumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industry tersebut (Jhingan,20010).

### **C. Teori Pembangunan Hollis B.Chenery**

Chenery tentang teorinya *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian Negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yg dilakukan Chenery tentang

transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu Negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu Negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumber daya manusia (*human capital*) (Todaro & Smith, 2011).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan ini maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa transisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro, 2011).

#### **D. Teori Aliran Keynesian**

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya

lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini memerlukan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dilakukan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah (Jhingan, 2010).

#### **D. Teori Harrod – Domar**

Teori ini dikembangkan oleh R.F Harrod dan Evsey Domar. Dalam teori ini menjelaskan tentang persyaratan–persyaratan yang dibutuhkan suatu negara agar perekonomian negara dapat tumbuh dan berkembang baik. Model Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes yang mengatakan bahwa investasi akan meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam hal ini Harrod-Domar memperluas teori Keynes tentang

keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Teori Keynes lebih memperhatikan pada tingkat pendapatan yang stabil, berdasarkan kesempatan kerja penuh.

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut :

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk *menabung* (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capitaloutput ratio = ICOR*)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya untuk sekedar mengganti barang – barang modal yang bisa atau rusak (gedung, peralatan, dan bahan-bahan). Akan tetapi, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Jika kita mengansumsikan adanya hubungan ekonomi langsung antara jumlah total persediaan modal,  $K$ , dan total GDP,  $Y$  misalnya, jika \$3 dari modal selamanya diperlukan untuk menghasilkan tambahan GDP tahun sebesar

\$1 berarti setiap tambahan neto pada persediaan dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan dalam arus output nasional (*national output*), GDP.

Misalkan hubungan ini, yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai **rasio modal-output** (*capital-output-ratio*), kira-kira adalah 3 berbanding 1. Jika kita tetapkan rasio modal – output,  $k$ , dan selanjutnya kita andaikan juga bahwa **rasio tabungan neto** (*next savings ratio*),  $s$ , adalah bagian tetap output nasional (misalnya, 6%) dan total investasi baru ditentukan oleh tingkat tabungan total, kita dapat membuat model sederhana pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

1. Tabungan ( $S$ ) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau ( $s$ ), dari pendapatan nasional ( $Y$ ). Oleh karena itu, kita pun dapat menuliskan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan yang sederhana :

$$S = sY \dots\dots\dots (2.1)$$

2. Investasi neto ( $I$ ) didefinisikan sebagai perubahan stok modal ( $K$ ) yang dapat diwakili oleh  $\Delta K$ , sehingga kita dapat menuliskan persamaan sederhana yang kedua sebagai berikut:

$$I = \Delta K \dots\dots\dots (2.2)$$

Akan tetapi, karena jumlah stok modal,  $K$ , mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output,  $Y$ , seperti telah ditunjukkan oleh

47 Ekonomi Pembangunan rasio modal-output,  $c$ , maka :

$$\frac{k}{y} = c \dots\dots\dots (2.3)$$

**Atau**

$$\frac{\Delta K}{\Delta Y} = c \dots\dots\dots (2.4)$$

**Atau atau akhirnya**

$$\Delta k = c \Delta y \dots\dots\dots (2.5)$$

3. Terakhir, mengingat tabungan nasional neto (S) harus sama dengan investasi neto (I), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut :

$$S = I \dots\dots\dots (2.6)$$

Dari persamaan (2.1) telah diketahui bahwa  $S = sY$  dan dari persamaan (2.2) dan (2.3), telah mengetahui bahwasannya :

$$I = \Delta k = c\Delta y \dots\dots\dots (2.7)$$

Dengan demikian, kita dapat menuliskan “identitas” tabungan sama dengan investasi dalam persamaan (2.4) sebagai berikut:

$$S = sY = c\Delta = \Delta K = I \dots\dots\dots (2.8)$$

Atau untuk menyederhanakannya menjadi

$$sY = c\Delta Y \dots\dots\dots (2.9)$$

Akhirnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{c} \dots\dots\dots (2.10)$$

Perhatikan bahwa bagian kiri persamaan 2.7  $\Delta Y/Y$ , merepresentasikan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GDP.

Persamaan 2.7 merupakan versi sederhana dari persamaan terkenal dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, yang secara sederhana menyatakan bahwa 48 Ekonomi Pembangunan tingkat pertumbuhan GDP ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan oleh rasio tabungan nasional neto,  $s$ , dan rasio modal-output nasional,  $e$  secara bersama. (Todaro & Smith, 2011).

### E. Konsep Millenium Development Goals (MDG's) to SDG's

Pada bulan September tahun 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyetujui dan digagas Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yang

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015, dengan berbagai tujuan dan target yakni :

- 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem
- 2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Kedelapan tujuan tersebut bila melihat pencapaian pembangunan yang telah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, mungkin masih banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Kritik-kritik tersebut antara lain tujuan dan target MDGs disusun melalui proses yang sangat birokratis dan teknokatis. Kedua, desain dari tujuan dan target tersebut juga dikritik oleh beragam perspektif. Sebagai misal, tidak ada perhatian yang cukup terhadap persoalan ketimpangan dan kesetaraan gender dalam tujuan-tujuan 49 Ekonomi Pembangunan MDGs. Ketiga, tujuan, target, dan indicator yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Keempat, kurangnya akuntabilitas dan universalitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke-8 dari MDGs (UNDP, 2015).

Setelah era MDGs yang telah berakhir pada 2015, kini sedang disusun sebuah dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan capaian-capaian yang belum sempat terealisasi sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat. Oleh karena itu, pembangunan pasca-2015 tersebut mulai disusun dengan mengatasi berbagai hambatan-hambatan untuk kemajuan pembangunan termasuk soal ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif, masyarakat damai dan beberapa persoalan lainnya. Penyempurnaan tersebut melahirkan tujuan dan target yang tersusun dalam 17 poin tujuan dan 169 target Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan berlaku hingga 2030.

Bila disimpulkan tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain (UNDP, 2015). Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan.

### **2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Hollis B. Chenery (Todaro & Smith, 2011), Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi

dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

### **2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

#### 1. Adam Smith

Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation* ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.

##### a. Pertumbuhan output

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu :

- 1) Sumber daya alam
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Stok kapital yang tersedia

Sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun. Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan pekerja 1 juta orang untuk menggunakannya, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya 900 ribu orang maka jumlah penduduk yang akan menempati pekerjaan itu akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan mencapai 1 juta orang.

Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan output. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan *output*. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Di samping itu laju pertumbuhan *output* juga tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan itu akan terus melaju hingga akan

dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil.

#### b. Pertumbuhan penduduk

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

#### 2. David Ricardo

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya juga masih tetap sama yaitu bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya mencapai posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu, sumber-sumber alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Perbedaan terutama terletak pada penggunaan alat analisis mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo yang terkenal itu) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian di antara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan. (Mudrajad Kuncoro, 2000).

Proses pertumbuhan yang digambarkan Ricardo ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terbatasnya jumlah tanah, yang sangat susah untuk diperluas, sebagai faktor produksi.
- b. Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah (*natural wage*).
- c. Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat.
- d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.
- e. Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan.

### 3. Thomas Robert Malthus

Dalam pandangan mazhab Klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikansi masalah pertambahan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat daripada suplai makanan. Produksi makanan per kapita, tentu saja akan mengalami penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus berpendapat bahwa tidak menjadi jaminan kalau pertambahan penduduk secara kuantitatif akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan. Malthus membeberkan sejumlah faktor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan riilnya juga akan meningkat dengan sepadan. Pertambahan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila

perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli real (permintaan efektif) secara menyeluruh. Barulah, dalam keadaan demikian maka akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan akan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam teorinya mengenai ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai (*theory of underconsumption*). (Boediono, 2009).

Masalah penting dalam pembahasan Malthus yang menarik perhatian dan sampai sekarang masih relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang ialah segi institusi yang bersifat sosiologis- ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju, termasuk di kalangan cendekiawan, sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi di belahan dunia lain (Amerika Latin, Afrika, Asia) disebabkan oleh tabiat dan perilaku penduduk setempat, yaitu sikap memudahkan sesuatu, malas dan mempunyai ketergantungan pada alam yang sangat tinggi, keadaan sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia. (Boediono, 2009).

Pandangan yang dangkal tetapi populer itu kebenarannya dibantah oleh Malthus. Malthus menunjuk kepada kenyataan institusional dalam tata susunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala besar bagi kemajuan rakyat. Keterbelakangan dan kemiskinan penduduk di negara-negara yang dimaksud bukanlah disebabkan oleh terbatasnya tanah subur atau semakin kecilnya luas tanah karena penduduk bertambah; bukan pula oleh “kemalasan” penduduk. Kemiskinan itu ada sangkut-pautnya dengan kenyataan bahwa tanah yang sangat

luas dikuasai oleh segelintir kalangan atas dalam masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga tuan tanah. Konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serupa itu tidak memberikan dorongan dan sama sekali tidak mengandung perangsang bagi petani penggarap tanah untuk mencari kemajuan dengan cara meningkatkan hasil produksinya, apalagi dengan cara melakukan investasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil produksi tanah dinikmati oleh tuan tanah, sedangkan hasil produksi masyarakat kecil (golongan lemah) lebih diperuntukkan buat pemenuhan kebutuhan dasar dan hanya sebagian kecil yang diinvestasikan. (Boediono, 2009).

#### 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Max

Pola pendekatan dinamika (*pattern of dynamic approach*) yang menyangkut perkembangan masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang, bukanlah cara pandang yang baru timbul di zaman modern. Haluan pemikiran tersebut telah terkandung di dalam gagasan-gagasan para pakar teori klasik. Pola pendekatan demikian lebih menonjol lagi dalam sistem pemikiran Karl Marx, yang dapat dianggap sebagai teori dinamika yang paling komprehensif. Dalam hubungan itu, pandangan para pakar teori klasik dan Karl Marx dapat dimasukkan dalam kategori *grand theories* dan kadang – kadang sebagai *magnificent dynamics*. Karl Marx menyoroti banyak aspek dalam teorinya yang terkenal sebagai teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dari polanya yang sederhana hingga menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis. (Boediono, 2009).

Dalam gagasannya mengenai konsep materialisme historis, Marx mengungkapkan bahwa aktivitas produktif manusia merupakan kunci untuk menganalisis kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi substansi masyarakat kapitalis, yaitu bahwa seluruh masyarakat harus membuat diri mereka produktif dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terikat dalam produksi yang bersifat materi. Para kapitalis merupakan pihak yang memiliki posisi tawar tertinggi, sedangkan kaum buruh hanya dapat menjual tenaganya kepada majikan sebagai satu input dalam proses produksi. Maka, terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap kaum buruh. Pada masa itu modal merupakan kunci untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang diperolehnya. Menurut Marx, kemampuan kapitalis untuk mengakumulasi modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakannya. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan manifestasi dari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. (Boediono, 2009).

#### **2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes**

Perapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif

terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijumpai oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut tejumpai. Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun.

Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (*kumulatif*). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. (Jhingan, 2010).

Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. Pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan berkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya ialah  $\Delta Y = K\Delta I$ , dan  $1-1/K$  mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengali  $K = 1/1-MPC$ . Karena kecenderungan marginal berkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan. (Jhingan, 2010).

Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam “*General Theory*”-nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul “*Economic Possibilities for Our Grand Children*” Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (i) kemampuan kita mengendalikan penduduk; (ii) kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil; (iii) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, mempedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan; dan (iv) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Sejauh menyangkut kekhawatiran akan masa depan kapitalisme, Keynes bersifat optimis. Keynes menganggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan daya adaptasi yang

besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan over-produksi umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan. (Jhingan, 2010).

### **2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik**

#### **1. W.W. Rostow**

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* pada Maret 1956 berjudul *The Take- Off Into Self-Sustained Growth* pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhannya hanya dalam tiga tahap: tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. (Boediono, 2009)

Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi '*less developed*', untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi '*more developed*' untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern.

Dalam hal prakondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap- tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel – variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi

menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat *unilinear* dan *universal*, serta dianggap bersifat permanen.

Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai ‘teori modernisasi’. (Kuncoro M. , 2000).

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu :

1. Masyarakat tradisional (*The Traditional Society*)
2. Masyarakat Pra-kondisi untuk Periode Lepas Landas (*The Preconditions for Take Off*)
3. Proses Lepas landas (*The Take Off*)
4. Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)
5. Tingkat Konsumsi Tinggi (*High Mass Consumption*)

## 2. Harrod – Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod- Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). (Boediono, 2009).

Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

- a. Perkonomian bersifat tertutup
- b. Hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan
- c. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ( $Y = C + I$ ).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = K = n \dots\dots\dots(2-1)$$

Dimana :

$g = Growth$  (tingkat pertumbuhan output)

$K = Capital$  (tingkat pertumbuhan modal)

$n =$  Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa

pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

#### **2.1.2.4. Produk Domestik Bruto (PDB)**

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian sedang berlangsung baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product* (GDP).

*Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (*final*) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Dalam *Gross Domestic Product* (GDP) terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan.<sup>46</sup> Selain itu, *Gross Domestic Product* (GDP) juga mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, 2007).

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB yaitu (Case & Fair, 2008):

##### a. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir.

##### b. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu.

#### c. Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara itu sendiri.

### **2.1.3 Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Zaini Ibrahim, “Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik. Adapun instrument dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

1. Belanja/pengeluaran negara ( $G = \text{government expenditure}$ )

2. Perpajakan ( $T = \text{taxes}$ )

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka :

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha

2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi

3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

#### **A. Tujuan Kebijakan Fiskal**

Pada dasarnya, Kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due, yaitu :

1) Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.

2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau

mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

3). Berdasarkan teori Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat ( $AD = C + G + I + X - M$ ) dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi/depresi ekonomi.

4) Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

## **B. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal**

Pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Kebijakan fiskal Ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan Ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi.

2) Kebijakan Fiskal Kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu :

### 1. Pembiayaan fungsional (*The functional finance*)

Pembiayaan Fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatannasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada

beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu:

- a) Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta (*private sector*).
- b) Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
- c) Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri bentuk percetakan uang.

## 2. Pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*)

Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.

Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu di jaga. Kemudian untuk menghindari atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

## 3. Stabilitas anggaran (*the stabilizing budget*)

“Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program”.

Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

#### 4. Pendekatan anggaran belanja berimbang (*balance budget approach*)

Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga pemerintah tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun keluar negeri.

### **C. Indikator Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat (khususnya permintaan swasta).

“Indikator yang biasa dipakai (meskipun kadangkala menyesatkan) untuk kebijakan fiskal ini adalah budget defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan (terutama dari pajak)”.

#### **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu teori makro dan teori mikro.

##### **2.1.4.1 Teori makro**

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono,2009).

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

#### 1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya,

Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat. (Mangkoesobroto,2001).

## 2. Teori Adolf Wagner

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesobroto, 2001).

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya

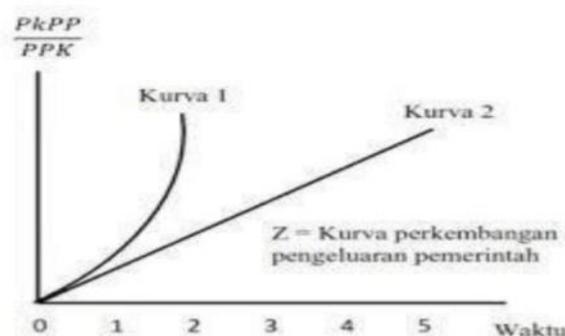
$$\frac{PPkP}{PPk1} < \frac{PkPPn}{PPk2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPkn}$$

Fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wganer dapat diformulasikan sebagai berikut :

Dimana :      PPkP : Pengeluaran pemerintah

PPkp : Pendapatan perkapita (GDP/jumlah penduduk)

1,2,..n : Jangka waktu (tahun)



## **gambar 2. 1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

*Sumber : Mangkoesobro, 2001*

Kurva diatas menunjukkan secara relative peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wager mendasarkan pandanganya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organisasi yang mengagap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

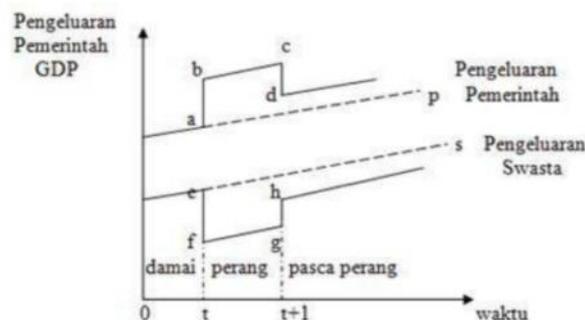
### 3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai sematamata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan

hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini :



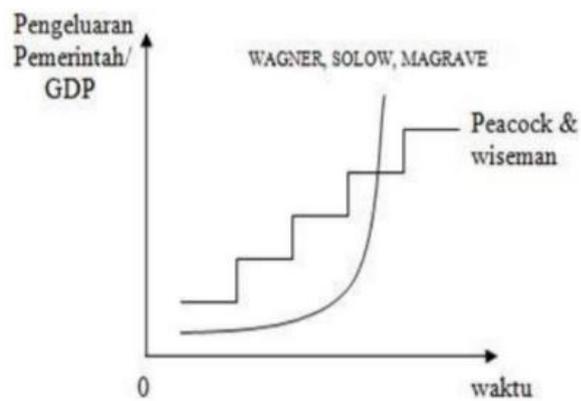
**gambar 2. 2 Kurva Peacock dan Wiseman**

*Sumber : Mangkoesobroto, 2001*

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk

mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva dibawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



**gambar 2. 3 Kurva Wagner, Solow, Dan Musgrave**

*Sumber : Mangkoesobroto, 2001*

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

### 2.1.3.2 Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi

antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. (Mangkoedobroto : 2001). Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Penentuan Permintaan

$$U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana :

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak  $G_k$ . Untuk menghasilkan 1 barang K sebanyak  $G_k$ , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjaga keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

b. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana :

$U_p$  = fungsi utilitas

$S$  = keuntungan yang diperoleh politisi

$G$  = Vektor barang publik

$X$  = Vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-4)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i \dots \dots \dots (2-5)$$

Dimana :

$P$  = Vektor harga barang swasta

$X$  = Vektor barang swasta

$B_i$  = Basis pajak individu 1

$M_i$  = Total pendapatan individu 1

$T$  = Tarif Pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses , yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*) atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

## 2.1.5 Regulasi Pemerintah

### 2.1.5.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan (Kuncoro, 2004).

#### 2.1.5.2 Desentralisasi Fiskal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat (Rochjadi, 2004).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor

yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (sentralisasi) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah eksternalitas dan uang, yang kedua ialah preferensi (Azwardi & Abukosim, 2007).

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Azwardi & Abukosim, 2007).

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (revenue sharing) dan bantuan (grants). Adapun tujuan dari transfer ini adalah pemerataan vertikal (vertical equalization), pemerataan horizontal (horizontal equalization), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (correcting spatial externalities), mengerahkan prioritas (redirecting priorities), melakukan eksperimen dengan ide- ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap daerah (Hermawan, 2007).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

### **2.1.6 Kebijakan Dana Desa**

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana 63

Ekonomi Pembangunan Transfer Daerah (on top) secara bertahap.  
([www.Kemendes.go.id](http://www.Kemendes.go.id))

#### **A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing - masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, 64 Ekonomi Pembangunan menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50%. Capaian output paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.

Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk Tahap II disampaikan ke KPPN.

Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## **B. Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi

rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

d. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan 66 Ekonomi Pembangunan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

e. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
2. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

([www.Kemendesa.go.id](http://www.Kemendesa.go.id))

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. /Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<b>Shihabuddin Fuady Rangkuti,</b> Evaluasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Untuk Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Di Indonesia	Model Ekonomi Panel Data	Dana Desa, PDRB, Belanja Daerah, IPM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembentukan IPM,PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM, Belanja Daerah berpengaruh negative namun signifikan terhadap pembentukan IPM
2.	<b>Intan Mala Sari,M. Faisal Abdullah</b> Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di kabupaten Tulung Agung	Kualitatif Deskriptif	Dana Desa, ADD,Kemiskinan Desa	Diketahui bahwa Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan desa, dan Alokasi Dana Desa juga berpengaruh negatif terhadap Desa.
3.	<b>Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V.J.Panelewen,Arief D.P.Mirah (2017),</b> Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan	Deskriptif kualitatif	Dana Desa, Pendapatan Masyarakat, Dan Penyerapan Tenaga Kerja	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dana Desa mempunyai manfaat yang positif untuk peningkatan pembangunan dan

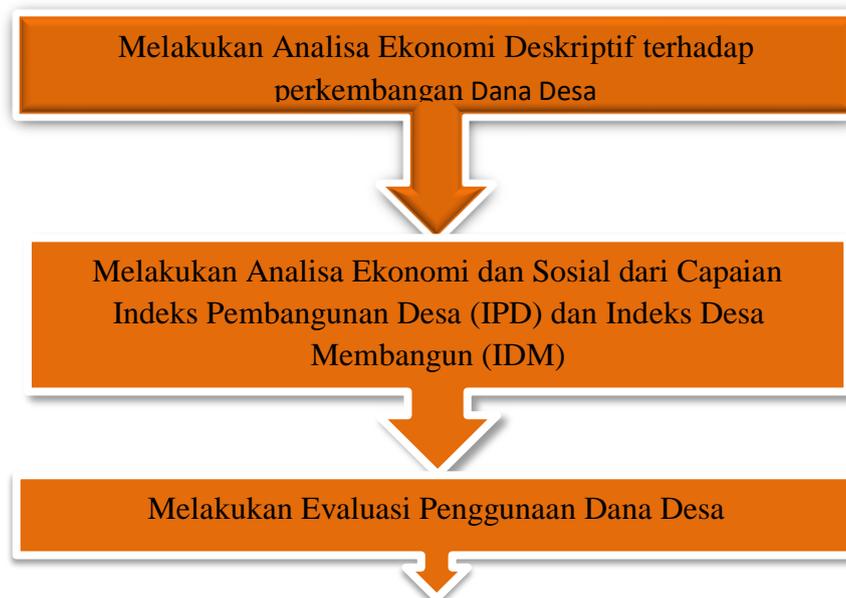
	Pineleng Minahasa	Kabupaten			perekonomian
--	----------------------	-----------	--	--	--------------

Perbedaannya dengan penelitian yang diteliti ialah, peneliti mencoba untuk meneliti pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan desa di Kecamatan Brandan Barat dengan judul penelitian ialah, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Peneliti mencoba untuk meneliti dengan menggunakan model analisis kualitatif sebagai tujuan untuk mengetahui “ Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat”.

### 2.3 Tahapan Penelitian

Secara umum, Adapun kerangka penelitian berdasarkan pada pengelolaan dana desa terhadap capaian pembangunan ekonomi masyarakat desa.

#### 2.3.1 Kerangka Analisis Penelitian



**gambar 2. 4 Kerangka Analisis Penelitian**

### **2.3.2 Kerangka Konseptual**



**gambar 2. 5 Bagan Konseptual**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh langsung dari observasi lapangan di tempat penelitian, dan data sekunder di peroleh dari Badan Pusat Statistik di Kabupaten Langkat dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

#### 3.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional Merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1Defini Operasional**

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Dana Desa	Dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pembangunan desa dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
Pengelolaan Dana Desa	Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa	Kementerian Keuangan <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
Kesejahteraan Masyarakat	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara	BPS (Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM)	Tingkat kemajuan desa dalam satuan persen	BPS (Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

#### **3.3.2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu Juni sampai Agustus 2022.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer. Data primer adalah data yang di peroleh penulis langsung dari obyek penelitian melalui observasi, wawancara , dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan dalam penelitian ini.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), dan menggunakan data dari sumber yang terkait.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan observasi langsung lapangan, melakukan wawancara, dokumentasi

terhadap pemerintah desa yang berada di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Metode analisis deskriptif merupakan metode Analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi dengan menyajikan dalam bentuk table, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Analisa deskriptif kualitatif menggunakan data primer yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variable yang di peroleh

#### **3.7.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa yang meliputi, perkembangan Dana Desa, Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun terhadap capaian ekonomi dan sosial masyarakat, serta melakukan evaluasi pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa di 2 desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Langkat**

###### **a. Letak**

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"–4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km<sup>2</sup> (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat memiliki batas-batas wilayah anatara lain :

1. Utara :berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka
2. Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo
3. Barat : berbatasan dengan Provinsi Aceh
4. Timur : berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai

**gambar 4. 1** Peta Wilayah Kabupaten Langkat



Sumber : <https://langkat.go.id>

**Tabel 4. 1** Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km2	%
1	Bahorok	1101.83	17.59
2	Sirapit	98.50	1.57
3	Salapian	221.73	3.54
4	Kutambaru	236.84	3.78
5	Sei Bingai	333.17	5.32
6	Kuala	206.23	3.29
7	Selesai	167.73	3.29
8	Binjai	42.50	2.68
9	Stabat	108.85	0.68
10	Wampu	194.21	1.74
11	Batang Serangan	899.38	3.10
12	Sawit Seberang	209.10	14.36
13	Padang Tualang	221.14	3.34
14	Hinai	105.26	3.53
15	Secanggih	231.19	1.68
16	Tanjung Pura	179.61	3.69
17	Gebang	178.49	2.87
18	Babalan	76.41	1.22
19	Sei Lapan	280.68	4.48
20	Brandan Barat	89.80	1.43
21	Besitang	720.74	11.51
22	Pangkalan Susus	151.35	2.42
23	Pematang Jaya	209.00	3.34

	<b>Langkat</b>	<b>6263.74</b>	<b>100.00</b>
--	----------------	----------------	---------------

*Sumber : BPS Kabupaten Langkat*

Kabupaten Langkat memiliki 23 kecamatan dimana kecamatan luas daerah terbesar adalah Kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km<sup>2</sup> atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km<sup>2</sup> atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 km<sup>2</sup> atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

### **b. Topografi**

Kabupaten Langkat berdasarkan topografinya memiliki ketinggian 0-3.010 meter di atas permukaan laut dpl. Wilayah ini terbagi menjadi daerah rawa, dataran rendah, daerah lipatan dan pegunungan. Puncak tertinggi berada di Gunung Bandahara yaitu 3.010 meter. Secara umum topografi kabupaten Langkat dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Pesisir dengan ketinggian 0 sampai 4 meter di atas permukaan laut dpl, yaitu meliputi Kecamatan Secanggang, sebagian kecamatan Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Pangkalan Susus dan Besitang
2. Dataran rendah dengan ketinggian 4-300 meter dpl yang meliputi Kecamatan Stabat, Selesai, sebagian Kecamatan Sei Binjai, sebagian Kecamatan Tanjung Pura dan Padang Tualang
3. Dataran tinggi dengan ketinggian 300 meter dpl, meliputi sebagian kecil kecamatan Bahorok, Salapian, Kuala dan sebagian Kecamatan Sei Bingai.

### **c. Iklim**

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

#### 4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Langkat

##### a. Jumlah Penduduk

**Tabel 4. 2Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Langkat (jiwa), 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Menurut Penduduk Kecamatan dan Jenis Kelamin (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bahorok	21 489	21 392	42 878
2	Sirapit	8 623	8 498	17 121
3	Salapia	14 009	13 863	27 872
4	Kutambaru	7 324	7 098	14 442
5	Sei Bingai	26 015	26 166	52 181
6	Kuala	20 982	21 137	42 119
7	Selesai	37 591	37 114	74 705
8	Binjai	23 226	22 560	45 786
9	Stabat	43 907	44827	88 734
10	Wampu	22 129	21 533	43 662
11	Batang serangan	19 209	18 443	37 652
12	Sawit seberang	13 578	13 520	27 098
13	Padang Tualang	25 004	25 184	50 188
14	Hina	25 872	25 530	51 402
15	Secanggung	35 380	34 892	70 272
16	Tanjung Pura	34 982	34 379	69 361
17	Gebang	23 056	22 686	45 742
18	Babalan	30 880	29 795	60 675
19	Sei Lapan	25 635	24 713	50 348
20	Brandan Barat	12 112	11 488	23 600
21	Besitang	23 878	23 402	47 280
22	Pangkalan Susu	22 475	22 228	44 703
23	Pematang Jaya	7 128	6 846	13 974
	<b>Langkat</b>	<b>524 481</b>	<b>517 294</b>	<b>1 041 775</b>

Sumer : Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Langkat pada tahun 2019 tercatat 524.481 jiwa penduduk laki-laki dan 517.294 jiwa penduduk perempuan. Maka di atas bahwa Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Stabat dengan jumlah penduduknya 88.734 jiwa. Dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Pematang Jaya dengan 13.974 jiwa. Kecamatan Brandan Barat memiliki jumlah penduduk yaitu 23.600 dengan jumlah rincian jumlah penduduk laki-laki yaitu 12.112 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yaitu 11.488 jiwa, sehingga terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan melalui setiap Kecamatan, terlihat Kecamatan Brandan Barat memiliki jumlah penduduk yang sedang atau tidak terlalu padat.

#### b. Tenaga Kerja

**Tabel 4. 3Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2013**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15 – 19	19.336	7.164	26.500
20 – 24	30.957	21.852	52.809
25 – 29	32.028	17.989	50.017
30 – 34	42.521	40.476	82.997
35 – 39	38.327	21.357	59.684
40 – 44	29.236	24.680	53.916
45 – 49	32.970	21.916	54.886
50 – 54	19.119	19.087	38.206
55 – 59	11.931	6.080	18.011
60 +	27.359	9.910	37.269

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat([www.langkatkab.bps.go.id](http://www.langkatkab.bps.go.id))

Dari data di atas menunjukkan tingkat usia kerja 30-34 paling banyak untuk laki-laki sebesar 42.521 jiwa dan usia kerja untuk perempuan sebesar 40.476 jiwa. Total pekerja di Kabupaten Langkat usia 15-60 tahun keatas yaitu 37.269 jiwa. Selain itu kerja 15 tahun keatas sesuai data yang diperoleh dari

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat yang bekerja menurut jenis kegiatan utama sebagian berikut ;

**Tabel 4. 4Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan, 2015**

Jenis Kegiatan	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>298.448</b>	<b>155.902</b>	<b>454.350</b>
1. Bekerja	277,631	140,275	417,906
2. Pengangguran Terbuka	20,817	15,627	36,44
- Pernah Bekerja	2,771	4,281	7,052
- Tidak Pernah Bekerja	18,046	11,346	29,392
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>54.080</b>	<b>195.872</b>	<b>249.955</b>
1. Sekolah	25,652	32,942	58,594
2. Mengurus Rumah Tangga	2,549	151,012	153,561
3. Lainnya	25,879	11,921	37,800
<b>Jumlah Penduduk 15+</b>	<b>352.528</b>	<b>351.777</b>	<b>704.305</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	84.66	44.32	64.51
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.98	10.02	8.02

Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2016 ([www.langkatbps.go.id](http://www.langkatbps.go.id))

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Langkat pada tahun 2015 tercatat 454.350 jiwa dengan rincian 298.448 jiwa angkatan kerja laki-laki dan 155.902 jiwa angkatan kerja perempuan. Sedangkan pada jumlah bukan angkatan kerja 249.955 jiwa dengan rincian 54.080 jiwa bukan angkatan kerja laki-laki dan 195.875 jiwa bukan angkatan kerja perempuan.

#### **4.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Langkat.**

Kondisi ekonomi masyarakat dilihat dari nilai PDRB dan PDRB PeKapita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dan

PDRB PerKapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah .

#### A. Nilai PDRB

Potensi ekonomi sangat penting pada pertumbuhan daerah yang merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di Kabupaten Langkat. Caranya dengan distribusi yang mendominasi di wilayah/daerah tersebut dan mengembangkan untuk mendorong distribusi yang lain agar terdorong maju dan berkembang dengan tujuan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum terdapat empat sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Langkat yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan, jasa dan hotel. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur dan mengelola dengan mengembangkan distribusi tersebut. Untuk melihat perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB dari segi lapangan usaha yang mendominasi.

**Tabel 4. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Langkat (Milyar Rupiah) 2019-2021**

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12 737,61	12 872,40	13 359,53
B. Pertambangan dan Penggalan	2 931,33	2 868,05	2 987,88
C. Industri Pengolahan	4 140,11	4 060,39	4 152,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	69,61	71,11	73,28
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	11,71	12,12	12,78

Limbah dan Daur Ulang			
F. Konstruksi	2 179,25	2 083,69	2 148,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	2 878,38	2 807,03	2 877,87
H. Tranportasi dan Pergudangan	642,40	582,16	578,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	641,66	593,87	601,37
J. Informasi dan Komunikasi	416,43	456,35	483,41
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	543,40	544,55	565,98
L. Real Estat	813,08	816,37	817,54
M,N. Jasa Perusahaan	153,78	145,59	145,38
O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	877,23	872,90	871,64
P. Jasa Pendidikan	357,48	359,19	372,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,80	142,20	142,00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	29 597,77	29 343,26	30 247,39
Produk Domestik Regional Bruto			

Sumber : Badan Pusat Statitik Kabupaten Langkat ([www.langkatbps.go.id](http://www.langkatbps.go.id) )

Pada tabel diatas menggambarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Langkat menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2021. Berdasarkan Tabel selama kurun waktu tahun 2019-2021 sektor jasa lainnya yang memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Langkat. Kemudian sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Langkat adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Setiap tahunnya sektor ini terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Langkat. Pada tahun 2019 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp 12 737,61 milyar, ditahun berikutnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga pada tahun 2021 sebesar Rp 13 359,53 milyar. Tingginya kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Langkat karena berdasarkan topografi wilayahnya dan

daerah potensial dijadikan sebagai tanah pertanian dan perkebunan. Kemudian sektor perikanan di Kabupaten Langkat juga memenuhi kebutuhan di Kabupaten dan daerah lainnya sehingga kegiatan perikanan mempunyai potensi yang cukup besar. Produksi perikanan Kabupaten Langkat tercatat 55.618,48 ton yang berasal dari 29.559,92 ton perikanan tangkap dan 26.058,48 ton yang berasal dari Barat merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah nelayan dan pengelolaan ikan yang cukup banyak di Kabupaten Langkat karena daerah yang dekat dengan wilayah pesisir. Dari 23 kecamatan di Kabupaten Langkat salah satu kecamatan penghasil pertanian dan perikanan adalah Kecamatan Brandan Barat.

Selanjutnya sektor yang minim memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Langkat adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan sektor yang trendnya mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 11,71 milyar terhadap Kabupaten Langkat, meningkat menjadi Rp 12,12 milyar di tahun 2020. Pada tahun 2021 sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami peningkatan sebesar Rp 12,78 milyar dari tahun sebelumnya.

## **B. PDRB PerKapita**

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di daerah itu. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. Pada tahun 2021,

PDRB perkapita Kabupaten Langkat mencapai 44,76 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 6,57 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2017-2021 berturut-turut sebesar 7,83 persen, 6,92 persen, 5,99 persen, 1,02 persen, dan 6,57 persen.

**Tabel 4. 6PDRB PerKapita Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)</b>	<b>PDRB Per Kapita (Ribu Rp)</b>	<b>Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2017	37 032,25	36 012,77	7,83
2018	39 867,65	38 504,18	6,92
2019	42 515,18	40 770,60	5,99
2020	43 208,00	41 997,10	1,02
2021	46 301,20	44 756,26	6,57

*Keterangan : \*) Angka Sementara\*\*) Angka Sangat Sementara*

*Sumber : PDRB Kabupaten Langkat menurut Lapangan Usaha ([www.langkatkab.bps.go.id](http://www.langkatkab.bps.go.id))*

#### **4.1.4 Kondisi Sosial Kabupaten Langkat**

Kondisi sosial merupakan keadaan yang berkaitan dengan situasi dalam masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk melihat kondisi sosial suatu daerah, dimana IPM Kabupaten Langkat mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, kesehatan, dan hidup layak melalui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Sehingga berpengaruh pada tingkat kemiskinan di suatu daerah, keberadaa penduduk miskin dalam suatu wilayah tidak akan membawa kemamkmuran bagi wilayah tersebut. Sehingga untuk melihat kondisi sosial di Kabupaten Langkat melalui grafik pembangunan manusia sebagai berikut.

##### **A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

**Tabel 4. 7Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Langkat Tahun 2018-2020**

IPM dan Komponennya	Indeks Pembanguna Manusia (IPM) dan Komponennya		
	2018	2019	2020
IPM	70,27	70,76	71,00
Harapan Hidup	68,22	68,59	68,80
Harapan Lama Sekola	12,75	12,81	13,05
Rata-rata Lama Sekola	8,52	8,64	8,65
Pengeluaran Riil Perkapita (Rp 000,-)	11 088,00	11 208,00	11 071,00

Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.langkatkab.bps.go.id](http://www.langkatkab.bps.go.id) )

Berdasarkan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Langkat pada tahun 2018-2020, dari tahun ke tahun angka harapan hidup selalu mengalami peningkatan seperti dari tahun 2018 sebesar 68,22 tahun menjadi sebesar 68,59 tahun pada tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 71,00 tahun. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dn kualitas pelayanan kesehatan. Untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten Langkat cukup rendah yaitu pada tahun 2018 hanya 8,52 tahun. Berarti pada tahun 2020, rata-rata penduduk Kabupaten Langkat yang berusia 25 tahun ke atas hanya mengecap bangku pendidikan formal selama 8,65 tahun. IPM menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah, untuk IPM Kabupaten Langkat peningkatannya cukup signifikan pada tahun 2018 hanya sebesar 70,27 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 71,00.

## **B. Kemiskinan**

Kemisikinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah, untuk melihat jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Langkat dapat dilihat dari gambar berikut.

**Tabel 4. 8Angka Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat Tahun 2017-2019**

Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan		
	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	114,41	105 455,00	103 080,00
Persentase	11,15	10,20	9,91
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	364 517,00	382 536,00	392 050,00
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,67	1,68	0,90
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,39	0,41	0,14

Sumber : Badan Pusat Statistik ([www.langkatkab.bps.go.id](http://www.langkatkab.bps.go.id))

Kemiskinan menjadi persoalan yang membutuhkan konsentrasi tinggi untuk ditangani pemerintah di suatu daerah. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Langkat mengalami tren menurun selama 2017-2019. Dapat dilihat persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2017 di Kabupaten Langkat yaitu sebesar 11,15 persen, mengalami penurunan 10,20 persen di tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin mengalami penurunan dengan persentase menjadi 9,91 persen. Pesentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat terus dilakukan upaya penurunannya oleh pemerintah Kabupaten agar tidak terjadinya ketimpangan sosial. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun kebijakan pemerintah yang menyangkut kemiskinan juga berpengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan.

## 4.2 Analisis Penelitian

### 4.2.1 Analisis Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemeratan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar

desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

**Tabel 4. 9Perkembangan Dana Desa Kabupaten Langkat 2019-2022 (Milyar)**

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2018	183.816.256
2.	2019	207.016.398
3.	2020	212.446.839
4.	2021	241.070.930

Sumber : Kementerian Keuangan RI ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Pada data diatas menunjukkan perkembangan Dana Desa Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2018 anggaran dana desa Kabupaten Langkat sebesar Rp 183.816.256 miliar. Tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 207.016.398 miliar naik dari tahun ke tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sebesar Rp 212.446.839 miliar untuk dana desa angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 anggaran untuk dana desa kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 241.070.930 miliar. Jika dilihat anggaran dana desa Kabupaten Langkat setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini disebabkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Perdesaan sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkn kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan

berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Sesuai dengan Nawacita butir ketiga yakni ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan’ diwujudkan dalam berbagai pendekatan mengatasi ketimpangan. Maka kebijakan Dana Desa diharapkan mampu mendorong perekonomian di daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di wilayah perdesaan. Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

#### **4.2.2 Analisa Ekonomi dan Sosial dari Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat serta 2 desa di Kecamatan Tersebut.**

Dikeluarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang desa memberikan sudut pandang baru tentang pembangunan desa, dimana desa diberikan peran menjadi subjek dalam pembangunan. Disebutkan bahwa pembangunan desa adalah suatu usaha untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dengan memenuhi kebutuhan sosial dasar serta mengoptimalkan potensi desa untuk ekonomi lokal dan pemanfaatan lingkungan berkelanjutan. UU Desa menguatkan posisi Desa dengan memberikan penegasan terhadap kewenangan Desa yang meliputi kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan hak asal usul. Dengan kewenangan tersebut, Desa memiliki hak penuh untuk mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing dengan dasar musyawarah untuk memajukan desanya menjadi salah satu kunci menuju Desa Mandiri selain dari peran pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan Desa

sendiri meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Pemendagri 114/2014 tentang Pembangunan Desa.

Untuk menentukan lokus sasaran pengentasan Desa Tertinggal, pemerintah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi peta pengembangan pembangunan Desa. IDM terdiri Indeks Ketahanan Sosial (IKS), indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), yang merupakan terjemahan dari kebutuhan pembangunan yang terulang pada pasal 74 ayat (2) UU Desa. Ketiganya indeks ini, sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang meliputi dimensi kondisi sosial, ekonomi dan berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan. Berdasarkan penilaian kondisi lapangan sesuai indikator masing-masing indeks, menghasilkan status kemajuan dan kemandirian Desa yang terdiri dari Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi tersebut sebagai penegasan atas status kemandirian desa dan intervensi yang perlu diberikan.

Kecamatan Brandan Barat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Dengan jumlah 5 desa di antaranya; Kelantan, Lubuk Kasih, Lubuk Kertang, Perlis dan Sei Tualang serta 2 kelurahan di antaranya; Tangkahan Durian dan Pangkalan Batu. Dari ke 5 desa tersebut peneliti hanya membahas 2 desa saja yaitu desa Kelantan dan Perlis. Ketiga desa ini diukur dalam status IDM termasuk dalam kategori Desa Tertinggal. Aktivitas ekonomi masyarakat di desa ini adalah petani, wiraswasta, nelayan dan tukang sampan. Desa Kelantan dan Perlis pada saat ini kedudukan desa sebagai subjek

pembangunan sehingga harus dilakukan pemerataan alasannya karena untuk penciptaan stabilitas pembangunan di pedesaan. Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan kesejahteraan. Berikut adalah nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kelantan dan Desa Perlis, Kecamatan Brandan

**Tabel 4. 10 Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kelantan, dan Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat 2019**

Desa	IKL	IKE	IKS	IDM	Status Kemandirian
Perlis	0,5333	0,5570	0,6652	0,5852	Tertinggal
Kelantan	0,5333	0,5443	0,6552	0,5412	Tertinggal

*Sumber : SK Dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Desa Perlis dan Kelantan pada tahun 2019 nilai IDM desa Perlis sebesar 0,5852 dan nilai IDM Desa Kelantan sebesar 0,5412 dengan status desa tertinggal. Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu mengintervensi kebijakan desa agar melahirkan inisiatif pembangunan sektor yang meningkatkan capaian indeks ekonomi dan lingkungan (IKL dan IKE). Sebagaimana pendapat Irawan (2017), lahirnya UU Desa memberikan wewenang pemerintah desa berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan, atau pendapat lainnya (Kolopaking,2011) yang menyebutkan kemandirian desa ditandai terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai kondidi dan keperluan desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggungjawab masyarakat desa memanfaatkan potensi desa sebagai pencapaian kesejahteraan.

Dalam Indeks Desa Membangun ada lima (5) klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa yaitu :

1. Desa Mandiri atau sangat maju adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Desa mandiri adalah desa yang memiliki indeks desa membangun lebih besar dari 0,8155
2. Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa maju adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.
3. Desa berkembang adalah desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Desa berkembang adalah desa memiliki indeks desa membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989.
4. Desa tertinggal adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih dari 0,4907.

5. Desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk dan juga rentan terhadap konflik sosial, guncangan ekonomi dan juga berbagai bencana alam. Sehingga tidak mampu untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi, sosial dan ekologi yang dimiliki. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki indeks desa desa membangun kurang dan lebih kecil dari 0,4907.

Permasalahan yang harus menjadi perhatian dalam upaya pembangunan desa di wilayah Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat adalah nilai IKE dan IKS. Desa Perlis dan Desa Kelantan terletak di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Penduduk desa ini mendirikan permukimannya di pinggir sungai, bahkan ada rumah yang berdiri di atas air dan bagian depannya menghadap langsung ke aliran utama sungai. Nama sungai tersebut adalah sungai Babalan. Karena wilayah desa sangat dekat dengan sungai maka matapecaharian desa ini adalah nelayan (perikanan). Kecamatan Brandan Barat merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah nelayan dan pengolahan ikan yang cukup banyak di Kabupaten Langkat. Dengan demikian, masyarakat desa perlis dan desa kelantan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya lautan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di desa ini relative berada dalam tingkat kesejahteraan rendah.

#### **4.2.3 Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kelantan Dan Desa Perlis di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.**

Penelitian ini mengambil objek penelitian sebanyak 2 (dua) desa dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Desa tersebut ialah Desa Kelantan dan Desa Perlis. Alasan pemilihan

sampel 2 (desa) tersebut karena letak desanya saling berdekatan, termasuk desa tertinggal yang tingkat aktivitas ekonomi masih rendah, serta kategori penerima Dana Desa terbesar diantara desa yang lain di Kecamatan Brandan Barat.

Dalam hal ini untuk menguatkan data yang diperoleh dari observasi lapangan maka dilakukan riset menggunakan wawancara kepada informan atau narasumber yaitu kepada aparatur pemerintah desa.

Kondisi Ekonomi Desa Perlis dan Desa Kelantan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) termasuk dalam klasifikasi Desa Tertinggal. Bahwa desa tersebut adalah Desa yang masyarakatnya memiliki mata pencaharian bidang pertanian dan bidang perikanan dll. Kegiatan ekonomi Desa Perlis dan Kelantan yang paling dominan adalah pada sektor perikanan.

Dana desa yang dikelola di Desa Kecamatan Brandan Barat adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat yang digunakan untuk membiayai pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa.

Adapun penggunaan Dana Desa di 2 desa Kecamatan Brandan Barat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggara pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan kemasyarakatan serta penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa (BLT-DD). Penggunaan Dana Desa tersebut juga telah dipublikasikan oleh pihak pemerintah Desa di ruang publik, terdapat baliho transparansi APBDesa tahun 2022 di depan kantor Desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 2 desa tersebut maka dengan rincian Alokasi Anggaran Dana Desa untuk setiap bidang sebagai berikut :

**Tabel 4. 11 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kelantan Tahun Anggaran 2022**

<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 0</b>
2.	Dana Desa	Rp 1.116.592.000
3.	Anggaran Dana Desa	Rp 406.683.000
4.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp 11.800.000
5.	<b>Pendapatan lain-lain</b>	<b>Rp 20.120.630</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 1.555.195.630</b>
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 406.683.000 (26%)
2.	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan	Rp 274.804.900 (18%)
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 189.800.000 (12%)
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 144.580.000 (10%)
5.	Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa (BLT-DD)	Rp 539.327.360 (34%)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 1.384.375.260</b>

Pada tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa total belanja desa yang diterima oleh Desa Kelantan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.384.375.260 yang penggunaannya dialokasikan ke 5 bidang diantaranya : Bidang

penyelenggara pemerintah dialokasikan Dana sebesar Rp 506.683.000, untuk bidang pembangunan desa sebesar Rp 274.804.900, untuk bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp 189.800.000 untuk bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar Rp 144.580.370, dan terakhir untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa (BLT-DD) sebesar Rp 539.327.360. khusus di bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa (BLT-DD) mendapat porsi Dana Desa yang lebih besar yaitu Rp 539.327.360 atau 34% dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang dikelola.

**Tabel 4. 12 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Perlis Tahun Anggaran 2022**

<b>B</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp 7.000.000,00
2.	Dana Desa	Rp 863.174.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak	Rp 61.683.000,00
4.	Alokasi Dana Desa	Rp 1.237.261.000,00
5.	Bursa Kerja Khusus Provinsi	Rp 138.000.000,00
6.	Bursa Kerja Kabupaten	Rp 165.000.000,00
7.	Pendapatan Lain-lain	Rp 30.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 2.502.118.000,00</b>
1.	Bidang Pemerintahan Desa	Rp 1.392.170.919,60 (53%)
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 264.765.839,78 (10%)
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 499.428.500,00 (19%)
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 41.855.000,00 (2%)
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak desa	Rp 414.702.800,00 (16%)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 2.612.931.495,38</b>

Sedangkan total belanja desa diterima oleh Desa Perlis untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.612.931.495,38 yang penggunaannya dialokasikan ke 5 bidang diantaranya : Bidang penyelenggara pemerintah dialokasikan Dana sebesar Rp 1.392.170.919,60, untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp

264.765.839,78, untuk bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp 499.428.500,00 untuk bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar Rp 41.855.000,00, dan terakhir untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp 414.702.800,00. khusus di bidang pemerintahan desa mendapat porsi Dana Desa yang lebih besar yaitu Rp 1.392.170.919,60 atau 53% dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang dikelola.

Dari kedua desa tersebut penggunaan Dana Desa berfokus pada anggaran pemerintahan desa yang digunakan untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak yang disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, bidang penyelenggaraan pemerintah, serta bidang penyelenggaraan pembangunan desa. Penggunaan Dana Desa ini digunakan untuk pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan Desa dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa dan staf Desa menjelaskan tentang jumlah Dana Desa tahun anggaran 2022 Desa Perlis menerima kurang lebih Rp. 863.174.000,00 dan Desa Kelantan Menerina Jumlah Dana Desa kurang lebih 1 milyar sudah termasuk ADD dan BHPRD. Pada Saat proses perencanaan melibatkan masyarakat yang di wakikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sehingga menghasilkan sejumlah kebijakan melalui beberapa tahap musyawarah seperti Mudus, Musdes, dan Musrembang Desa kemudian akan dilakukan rapat RKPDes dan APBDes. Setelah proses perencanaan kan masuk ke tahap pelaksanaan setelah seluruh usulan yang bersifat prioritas ditetapkan melalui APBDes. Untuk tahap Pelaksanaan juga

mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan melalui TPK seperti melibatkan masyarakat secara umum untuk bekerja sebagai tenaga kerja sementara pada proyek pembangunan Desa. Kemudian hasil yang telah direalisasikan melalui program pembangunan akan dipertanggungjawabkan berdasarkan asas transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas yang dilakukan dimulai dari TPK melaporkan hasil kegiatan kepada sekdes atas dasar itu sekdes membuat SPJ dan LPJ Pelaksanaan APBDES yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kepada Bupati Kabupaten Langkat.

Untuk potensi perekonomian Desa Kelantan dan Perlis memiliki dua sektor utama yaitu pada sektor pertanian dan perikanan, untuk saat ini kedua sektor tersebut belum tersentuh oleh Dana Desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melainkan bantuan dari APBD Langkat, karena untuk saat ini Pemerintah Desa masih berfokus pada pembangunan Infrastruktur fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi dalam wujud pembangunan jalan dan jembatan Desa. Untuk saat ini kegiatan pembangunan fisik desa kelantan berfokus pada lanjutan jalan jerambah dusun III, depan kantor 155 M x 1,3 M dengan jumlah anggaran dana desa sebesar Rp 229.004.900. Namun nyatanya proyek jalan jerambah di desa Kelantan di duga asal jadi. Karena jika dilihat secara langsung kondisi lanjutan jalan jerambah desa kelantan yang diduga dikerjakan oknum perangkat desa karena hampir seluruh tiang penahan pengerjaan jalan tersebut tidak berganti dan masih menggunakan yang lama. Oleh karena untuk kondisi infrastruktur desa kelantan masih rendah.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat di desa Kelantan dan Perlis terhadap pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan

perekonomian masyarakat Desa Perlis dan Kelantan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Secara umum masyarakat kurang mengetahui proses dan jumlah Dana Desa sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah Dana Desa dengan pasti. Karena pada saat Musrenbang Desa Pemerintah Desa tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh, tetapi menurut hasil wawancara kepada salah satu warga tokoh masyarakat, bahwa dirinya dilibatkan dalam musrenbang Desa. Beliau mengatakan proses musrenbang dilakukan dengan terbuka dan melibatkan masyarakat yang dianggap berkompeten tetapi dalam penginformasiannya hanya melalui papan informasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) melalui ketua RT tetapi sayangnya informasi tersebut tidak tersampaikan kepada masyarakat dengan jelas mengingat kurangnya pemahaman ketua RT terhadap proses Pengelolaan Dana Desa yang menyebabkan ketua RT kurang maksimal menjelaskan kepada masyarakat tentang informasi Pengelolaan Dana Desa.

Pada sektor perekonomian menurut masyarakat ada dua sektor yaitu sektor perikanan dan sektor pertanian yang menjadi sektor utama perekonomian masyarakat Desa Perlis dan Kelantan sangat memerlukan pembangunan pada sektor pertanian dan perikanan. Khususnya pada sektor perikanan masyarakat memiliki keluhan bahwa muara sungai yang dangkal menjadi penghambat keluar masuknya kapal nelayan untuk menangkap ikan sehingga nelayan menjadi kesulitan dalam melakukan pekerjaan ditambah lagi kapal pengangkut barang kebutuhan Desa dan barang hasil kegiatan ekonomi Desa menjadi terganggu. Hal ini sudah sering diajukan melalui rapat antar RT tetapi masih belum juga ada upaya untuk mengatasinya mengingat biaya yang digunakan untuk proyek

pendalam muara sungai sangatlah besar akhirnya menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah Desa dalam menjawab permintaan masyarakat.

Jika dilihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa. Desa diwajibkan membangun BUMDesa dengan harapan Desa mampu memperoleh sumber pendapatan asli Desa, dan juga sebagai pendorong ekonomi masyarakat agar mampu mandiri, tetapi hal ini belum dilakukan pada kedua desa tersebut. Tetapi lain halnya dengan Desa Perlis dulu Desa ini memiliki BUMDES tetapi saat ini BUMDES tidak berjalan dengan baik. Dari ungkapan masyarakat pada saat wawancara, masyarakat memiliki harapan agar Pemerintah Desa untuk kedepannya lebih mementingkan pembangunan perekonomian masyarakat melalui BUMDES dari pada pembangunan yang tidak memiliki manfaat secara prioritas.

Menurut Suharto (2010:71), perencanaan pada hakekatnya adalah menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya, sementara itu Menurut Manila I. GK (1996:25) mengatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakan didalam proses perencanaan.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelantan dan Perlis belum maksimal jika ditinjau berdasarkan perintah Undang-Undang dan peraturan Pemerintah yang berasaskan transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Pada hasil penelitian melalui observasi dan wawancara menjelaskan bahwa peran partisipasi

masyarakat kurang dilibatkan dalam proses Perencanaan pembangunan dan pengelolaan Dana Desa Perlis dan Kelantan.

Menurut Soeharto (2010:79) Tahap Pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses Perencanaan pada tingkat abstraksi atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan data yang didapatkan penulis menemukan bahwa Desa Perlis dan Kelantan belum maksimal dalam proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa jika dilihat dari indikator yang penulis buat. Untuk bentuk kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan menurut penulis sudah cukup baik, khususnya Desa Perlis telah mampu membangun 21 titik jalan baru, 6 titik drainase baru, 9 titik jerambah papan dan beton dan 8 titik sarana air bersih baru melalui Dana Desa. Namun ada beberapa dari item pelaksana yang belum terlaksana terutama pada bidang melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara penulis menemukan bahwa di Desa Perlis dan Kelantan untuk proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa belum maksimal jika dilihat dari indikator dan aturan yang ada, karena berdasarkan hasil temuan dilapangan Aparat Desa Perlis dan Kelantan kurang dari unsur transparansi dalam mengelola Dana Desa. Pada saat penulis meminta salinan RPJM, RKPDes, dan LPJ pihak Aparat Desa Perlis dan Kelantan belum bisa memberikan dokumen pengelolaan Dana Desa secara penuh kepada penulis, mengingat bahwa laporan pertanggungjawaban final belum selesai dikerjakakan karena belum berakhirnya tahun anggaran 2022. Hanya dokumen

RPJMDes RKPDes yang diperoleh penulis melalui Sekdes. Sementara Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 4, menjamin publik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan begitu informasi dalam bentuk dokumen yang bukan bersifat rahasia wajib diberikan apabila digunakan untuk kebutuhan pendidikan oleh lembaga atau pihak yang terpercaya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Langkat mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021. Pengembangan dan peningkatan Dana Desa di Kabupaten Langkat dilakukan untuk pengembangan potensi desa seperti pembangunan infrastruktur pedesaan.
2. Capaian sosial dan ekonomi dari Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2019 di Kabupaten Langkat masuk kedalam kategori status kabupaten berkembang sedangkan di tingkat kecamatan Khususnya Kecamatan Brandan Barat masuk kedalam kategori status desa tertinggal serta kesejahteraan masyarakat masih rendah.
3. Dana Desa yang dikelola di Desa Kelantan dan Perlis adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran dan Belanja Negara) yang di transfer melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat. pengelolaan dana desa di Kecamatan Brandan Barat Kabupten Langkat sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan APBDes 2022 Pembangunan desa yang dilakukan dari dana desa lebih difokuskan pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa (BLT-DD),

bidang penyelenggaraan pembangunan serta bidang penyelenggaraan pemerintahan.

4. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kelantan dan Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat belum maksimal dilakukan melihat dari hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya ikut serta dalam menentukan program pembangunan Desa.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Adapun saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa dan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap aparat desa tim pengelola yang secara langsung bertanggungjawab atas dana desa yang dikelolanya.
2. Pembangunan pedesaan harus di perhatikan terutama pembangunan desa pinggiran yang jauh dari kota. Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K.D., Erfit & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Volume 7, halaman 1-34.*
- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Unesa, 2-16.*
- Azwardi, & Abukosim. (2007). Pengelolaan Keuangan Pedesaan Dalam Mendorong Pembangunan Wilayah Pedesaan: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 5, Nomor 2.*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.* [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam Angka 2018
- Badan Pusat Statistik. 2018 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka.2020 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))
- Budianta, A. (2010). Pembangunan Wilayah Perbatasan Sebagai upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal SMARTek, Volume 8, 72-82.*
- Deiningner, K. , Dan Pedro, O. (2000). Asset Distribution, Inequality, and Growth. *The World Bank, 5-9.*
- Ginting, C., Lubis, I. & Mahalli, K. (2008). Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Volume 5.*
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrik dasar.* Jakarta: Erlanga.
- Hermawan, D. (2007). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten). *Institut Pertanian Bogor, 11.*

- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jhingan. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi Keenambelas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kemendesa. (2019). *Data Perkembangan Pembangunan Desa Menurut status IDM*. <https://idm.kemendesa.go.id>.
- Kemendesa. (2016). *Data Desa, Data Daerah Tertinggal dan Tertentu, Data Transmigrasi*. <https://idm.kemendesa.go.id>.
- Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Dana Desa per Pulau di Indonesia tahun 2017*. <http://www.kemenkeu.go.id>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Sebaran Dana Desa*

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Aparatur Desa*

#### **Pedoman Wawancara Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa**

**(Studi kasus Desa Kelantan dan Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat  
Kabupaten Langkat )**

#### **Daftar Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana proses penerimaan dana desa di Desa Perlis dan Kelantan ?

Jawab :

2. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Perlis dan Kelantan ?

Jawab :

3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa berupa fisik maupun nonfisik ?

Jawab :

4. Apakah masyarakat terlibat dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan terhadap program Dana Desa bagi masyarakat Desa Perlis dan Kelantan ?

Jawab :

5. Bagaimana peran dari perangkat desa dalam memberikan sosialisasi terhadap program Dana Desa bagi masyarakat Desa Perlis dan Kelantan ?

Jawab :

6. Apakah dengan adanya Dana Desa dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya ?

Jawab :

***Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Masyarakat Desa Perlis dan Kelantan***

1. Apakah pembangunan desa yang telah dilaksanakan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan anda selaku masyarakat Desa Perlis dan Kelantan ?

Jawab :

2. Apakah anda sebagai masyarakat juga ikut terlibat dalam mengontrol pengelolaan Dana Desa ?

Jawab :

3. Apakah anda sebagai masyarakat merasa terbantu atau sejahtera semenjak adanya Dana Desa?

Jawab :

4. Apa harapan Anda untuk pengelolaan Dana Desa ke depannya ?

Jawab :

*Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian*











MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2247/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/17/2/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 17/2/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Sari  
NPM : 1805180005  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Pengelolaan Dana Desa  
2. Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi
- Rencana Judul : 1. Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kec. Brandan Barat Kab. Langkat  
2. Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Kec. Brandan Barat Kab. Langkat  
3. Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan

Objek/Lokasi Penelitian : Masyarakat Desa Kec. Brandan Barat Kab. Langkat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Ratna Sari)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2247/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/17/2/2022

Nama Mahasiswa : Ratna Sari  
NPM : 1805180005  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tanggal Pengajuan Judul : 17/2/2022  
Nama Dosen Pembimbing<sup>\*)</sup> :

Prawidya Hariani RS.

Judul Disetujui<sup>\*\*)</sup>

Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap  
Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat  
Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten  
Langkat.

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan:

\*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567, Kode Pos Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA MAHASISWA** : RATNA SARI  
**NPM** : 1805180005  
**PROGRAM STUDI** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**KONSENTRASI** : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**JUDUL PROPOSAL** : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP  
CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT  
DESA KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN  
LANGKAT

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
14 Feb 2022	Bab I, bingkai hrs di revisi: agar sesuai dgn tujuan, limit dan di tentukan dgn detail: dan faktor.		
14 Maret 2022	Bab II, hrs sesuai dgn Grama yang ada kyan Negara dgn Muzak dan Macro bank yg.		
25 April 2022	Bab II, diteliti hrs dgn Pan-lyon terdulu dan kinyan keulahan + malaran yg sudah dgn kelayakan dana desa dan lebih fokus		
30 Mei 2022	Bab III, ul Metrolan hrs di lengkap: dgn tentukan agar ul kinyan, shy mnyuda pultr paper yg mnyuda.		
02 Mei 2022	Revisi hrs sesuai dgn Panlyan di Panduan Pymen Slayi.		
4/6-2022	All in Bab I, II & III sudah ACC upi		

Medan, ..... 2022

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Ekonomi  
Pembangunan

Pembimbing

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Pada hari ini 21 Juni 2022 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan  
rangkain bahwa :

Nama : Ratna Sari  
 N.P.M. : 1805180005  
 Tempat / Tgl.Lahir : Sinunukan, 29 Mei 1999  
 Alamat Rumah : Jl. Gunung Martimbang no 34  
 JudulProposal : Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi  
 Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	Analisis pengelolaan Dana Desa terhadap Capaian Pembangunan EKONOMI, MASYARAKAT DESA KEC. BRANDAN BARA K. LANGKAT
Bab I	Memperbaiki Bagian Identifikasi Masalah
Bab II	✓
Bab III	Ubah Analisis Data
Lainnya	
esimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 21 Juni 2022

**TIM SEMINAR**

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Pembimbing

Dr.Prawidya Hariani RS,S.E.,M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pemanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Selasa 21 Juni 2022** menerangkan bahwa:

Nama : Ratna Sari  
N .P.M. : 1805180005  
Tempat / Tgl.Lahir : Sinunukan, 29 Mei 1999  
Alamat Rumah : Jl. Gunung Martimbang no 34  
JudulProposal : Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan  
Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten  
Langkat

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dr.Prawidya Hariani RS,S.E.,M.Si*

Medan, 21 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dr.Prawidya Hariani RS,S.E.,M.Si

Pembanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Diketahui / Disetujui  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : RATNA SARI  
NPM : 1805180005  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : JL.GUNUNG MARTIMBANG NO.34  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP  
CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT  
DESA KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN  
LANGKAT

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12-08-2022	- Perbaiki dan perhatikan koreksi-koreksi yang ada - Melengkapi Daftar. - Melengkapi lagi dengan penulisan terdahulu.		
16-08-2022	- Buat abstraknya - Buat daftar tabel dan daftar pustaka - Lampirkan kuisisinya.		
23-08-2022	- Perhatikan lagi penulisan daftar pustaka		
29-08-2022	- Telah selesai dikoreksi dan setya untuk sidang skripsi		

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Medan, September 2022  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar diutamakan untuk dipergunakan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 2404 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2022**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

**Program Studi** : **Ekonomi Pembangunan**  
**Pada Tanggal** : **8/15/2022**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

**Nama** : **Ratna Sari**  
**N P M** : **1805180005**  
**Semester** : **VIII (Delapan)**  
**Program Studi** : **Ekonomi Pembangunan**  
**Judul Proposal / Skripsi** : **Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan  
Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten  
Langkat**

**Dosen Pembimbing** : **Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **15 Agustus 2023**
4. Revisi Judul.....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 17 Muharram 1444 H  
15 Agustus 2022 M



Dekan

**H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.**  
**NIDN : 0109086502**

**Tembusan :**  
1. Peringgal

